

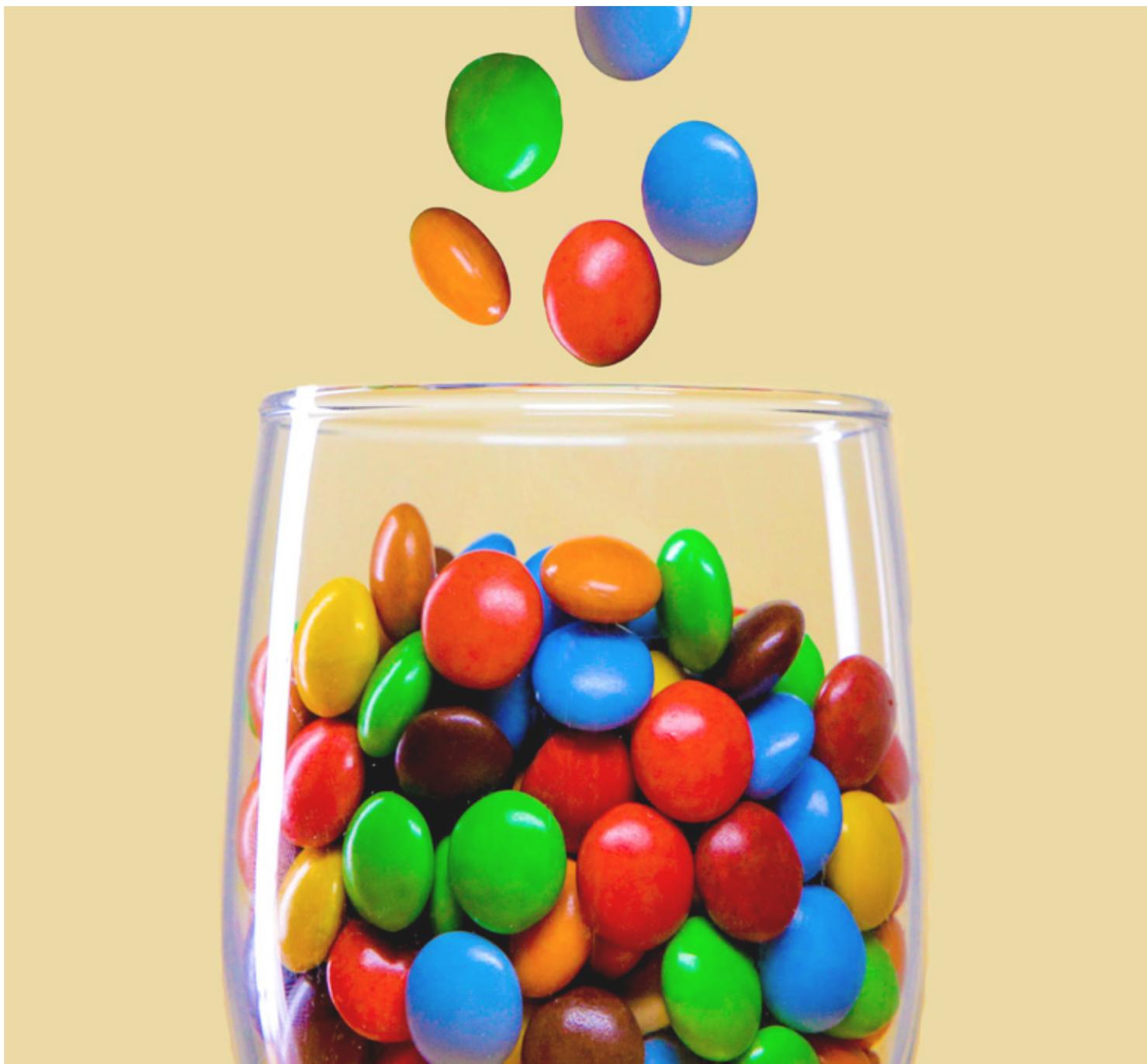
EDISI 47 / 2018

EDUKASI

K E U A N G A N

SEMINGGU BERSAMA KELUARGA KEMENKEU

Meramu perbedaan menjadi harmoni



Susunan Redaksi

PENANGGUNG JAWAB

Sekretaris BPPK

PEMIMPIN REDAKSI

Sugeng Satoto

SEKRETARIAT

Abdul Aziz Maghfur

Dodi Septariza

Naseh Iskandar

Eko Supriyono

Fitria Sri Wulandari

REDAKTUR

Khalimi

Andi Manaek

Soderi

Eko Prasetyo

Tri Wibowo

Muhammad Irfan

Rio Suareski

Agus Hekso Pramudijono

Hartono

Agung Darono

Sintawati

Kurniawan

Inwan Hadiansyah

Agus Sunarya

R. Adhi Sutanto

Eduard Tambunan

Pilar Wirotama

EDITOR

Sudrajat

Ari Sandi Robert

Retyan Laksita Mutiary

Ardes Martua Sitanggang

Yohana Tolla

Ridwan Sidik Kurniawan

Imam Asma Nur Alam Marbun

Bima Lingga Sakti

DESAIN GRAFIS & FOTOGRAFER

Muhammad Fath Kathin

Victorianus M. I. Bimo Adi

Seno Adi Nugroho

Redaksi menerima artikel untuk dimuat dalam majalah ini. Artikel ditulis dalam huruf Arial 11 spasi 1,5, maksimal 2.500 kata.

Artikel dapat dikirimkan ke edukasikeuangan@kemenkeu.go.id.

Isi majalah ini tidak mencerminkan kebijakan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

ALAMAT REDAKSI

Jl. Purnawarman No. 99 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110

Telp: +62 21 7394666, 7204131

Fax: +62 21 7261775

<http://www.bppk.kemenkeu.go.id>

DAFTAR ISI

SALAM REDAKSI	3
LINTAS PERISTIWA	4
LIPUTAN UTAMA	6
LIPUTAN KHUSUS	16
PROFIL	20
SERAMBI ILMU	26
INFOGRAFIS	40
KUIS	41
TAHUKAH KAMU	42
KOLOM <i>SOFTSKILL</i>	46
CERITA ALUMNI	48
TIPS & TRIK	51
MATA AIR	54
KESEHATAN	56
<i>POINT OF INTEREST</i>	58
RESENSI	61
GALERI	62
KANG EDU	64

SWAP

SHARING VIA WHATSAPP

SWAP adalah cara alternatif untuk berbagi pengetahuan dalam jaringan menggunakan media grup WhatsApp tematik. Konsep SWAP sendiri menyerupai seminar atau kuliah pada umumnya, di mana menghadirkan narasumber dan moderator sebagai pemandu jalannya diskusi sesuai dengan tema yang akan dibahas.



INFO LEBIH LANJUT
IKUTI INSTAGRAM @BPPKEMENKEU



250

PESERTA

Peserta SWAP (Sobat SWAP) akan memperoleh materi dan dapat mengajukan pertanyaan serta melakukan diskusi dalam grup WhatsApp tersebut.

DAPAT DIAKSES DI MANA SAJA

SWAP dapat dilakukan di mana pun peserta berada selama peserta dapat mengakses WhatsApp.



SALAM REDAKSI

Di tengah hiruk-pikuk era informasi saat ini, kesalahpahaman akan ras, agama, dan golongan masih sering muncul dan mengakibatkan timbulnya sikap intoleransi. Berbekal semangat bahwa toleransi itu harus dirasakan dan tidak hanya diajarkan, Kementerian Keuangan melalui Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan menyelenggarakan program Seminggu Bersama Keluarga Kemenkeu (SBKK) bekerjasama dengan organisasi SabangMerauke. Di program ini, adik siswa SMP dari penjuru Indonesia, ditemani oleh kakak mahasiswa dari PKN STAN tinggal selama satu minggu di rumah pejabat Kementerian Keuangan yang beragam. Mereka akan belajar tentang toleransi, perdamaian, kebinekaan, serta nilai-nilai Kemenkeu selama berinteraksi. Bagaimana keseruannya? Serta bagaimana kesan-kesan dari mereka yang terlibat? Anda dapat menyimak rubrik liputan utama kami di edisi ini.

Bagi anda yang sedang berburu informasi beasiswa, simak infografis beasiswa yang dikelola BPPK sekaligus Cerita Alumni penerima beasiswa tentang kehidupan kuliahnya.

Sedangkan bagi anda yang ingin kenal lebih dekat dengan Kepala BPPK baru Rionald Silaban, anda dapat membacanya di rubrik Profil.

Selain itu, rubrik khas Edukasi Keuangan lainnya seperti Liputan Khusus, Serambi Ilmu, Tahukah kamu, *Softskill*, dan Resensi juga kami hadirkan untuk anda.

Selamat membaca! Salam Toleransi!

SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU PKN STAN 2018

Proses panjang Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru PKN STAN Tahun 2018 yang dimulai sejak Maret lalu berhasil menyeleksi lebih kurang 6.700 mahasiswa baru pada berbagai program diploma dan spesialisasi. Di tahun ini pula, pertama kalinya PKN STAN menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)* secara *online* untuk ujian tertulis.



FOTO : SENO ADI NUGROHO & MUHAMMAD FATH



SEMINGGU BERSAMA KELUARGA KEMENKEU (SBKK)

Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Yayasan Sabang Merauke menyelenggarakan program Seminggu Bersama Keluarga Kemenkeu. Selama seminggu (7 - 15 Juli 2018), para peserta diajak untuk belajar tentang toleransi, serta berkesempatan bertemu dan berbincang dengan Menteri Keuangan.

DIES NATALIES KE-3 PKN STAN

Menteri Keuangan hadir puncak perayaan Dies Natalis PKN STAN 2018 yang dilaksanakan pada hari Minggu, 15 Juli 2018 di kampus PKN STAN Bintaro.



BOOTH BPPK PADA MOF HUMAN CAPITAL SUMMIT & EXPO 2018

BPPK turut serta memeriahkan kegiatan *Ministry of Finance HC Summit & Expo* yang diselenggarakan pada 14-15 Agustus 2018 di Gedung Dhanapala.



FOTO : SENO ADI NUGROHO & RIDWAN SIDIK KURNIAWAN



STUDI PERDANA MEMASUKI KAMPUS (DINAMIKA) PKN STAN 2018

Menteri Keuangan menyambut lebih kurang 6.700 mahasiswa baru program diploma I dan III PKN STAN, Sabtu, 25 Agustus 2018. Dalam kesempatan ini, Sri Mulyani mengucapkan selamat pada mahasiswa yang telah berhasil mengalahkan lebih dari 130.000 kompetitor.



YOHANA TOLLA

SEMINGGU BERSAMA KELUARGA KEMENKEU

Mari Belajar Toleransi

Toleransi, berasal dari kata “toleran” yang berarti bersifat atau bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Toleransi merupakan salah satu nilai yang mencirikan kepibadian bangsa Indonesia. Warisan budaya ini diturunkan dari generasi ke generasi. Melalui kearifan lokal, setiap wilayah di Indonesia menanamkan nilai-nilai toleransi dalam bentuk hidup yang rukun, saling menghormati, saling menjaga, dan selalu menjaga persaudaraan. Kearifan lokal tersebut diwujudkan dalam berbagai bentuk adat istiadat atau tradisi.

Pergerakan zaman secara langsung ataupun tidak langsung berdampak pada bergesernya nilai-nilai budaya. Salah satu yang mudah terlihat adalah mulai melunturnya nilai toleransi di masyarakat. Berdasarkan laporan *Social Progress Index* tahun 2017, Indonesia berada di posisi 117 dari 128 negara dalam toleransi dan inklusi dengan skor 35,47 dalam skala 100. Skor tersebut mengalami penguatan bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Skor terendah dicapai pada tahun-tahun yang memiliki peristiwa politik, seperti pada tahun 2014 dimana ada kegiatan Pemilihan Umum (27,9) dan tahun 2016 dimana ada persiapan pilkada serentak (29,57).

Melunturnya nilai toleransi juga bisa dilihat dari mulai bermunculannya gerakan radikalisme. Radikalisme bisa muncul dimana saja, tidak terkecuali lembaga pendidikan. “Jadi *gini* ya, stigma radikalisme itu kan tidak mudah dihilangkan. Kalau kita lihat kan banyak sekali pendapat dari banyak pihak yang menyatakan bahwa ada radikalisme di kampus,” ungkap Direktur PKN STAN Ramadi Murwanto. Oleh karena itu, Rahmadi merasa perlu untuk menyadari kenyataan tersebut serta melakukan perubahan. “Titik awal dari radikalisme itu adalah sikap/perilaku yang intoleran, tidak mau mengenal pihak lain, merasa dirinya eksklusif,” tambahnya.

Melihat kenyataan di atas, maka upaya merajut kembali toleransi menjadi penting untuk dilakukan. Berbagai cara dilakukan, dan tidak melulu menjadi tugas pemerintah. Penanaman nilai-nilai toleransi dirasa perlu dilakukan sejak dini. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Yayasan Sabang Merauke menyelenggarakan kegiatan Seminggu Bersama Keluarga Kemenkeu (SBKK).



“Semakin tinggi ilmu seseorang, maka akan semakin tinggi toleransinya.”

SBKK adalah pertukaran pelajar antar daerah di Indonesia, dimana anak-anak SMP ditempatkan di keluarga yang beda agama dan/atau beda etnis. Program ini bertujuan untuk mengajarkan toleransi. Program ini mengadopsi program yang telah dilakukan oleh Yayasan SabangMerauke. Ada tiga pihak yang menjadi sasaran dalam kegiatan ini, yaitu *Family*, Adik, dan Kakak. *Family* merupakan pejabat eselon I dan II di lingkungan Kementerian Keuangan. Adik adalah pelajar SMP yang telah diseleksi, dan Kakak adalah mahasiswa PKN STAN. Selama seminggu, Adik dan Kakak akan tinggal bersama dengan *family* yang memiliki latar belakang agama dan budaya yang berbeda untuk belajar tentang toleransi.

di Indonesia yang menasar pada siswa Sekolah Menengah Pertama. Para siswa ini diseleksi kemudian ditempatkan di keluarga yang berbeda agama dan/atau etnis dan dididik menjadi duta perdamaian. Sampai saat ini SabangMerauke telah menghasilkan sekitar 350 alumni.

Selain untuk membangkitkan kembali toleransi, program SBKK ini juga memberikan nilai tambah bagi para mahasiswa PKN STAN yang terpilih untuk menjadi Kakak. Ke depannya, para mahasiswa ini akan menjadi pegawai negeri, baik di Kemenkeu maupun di lembaga pemerintahan lainnya. Direktur PKN STAN berharap agar mereka dapat menjadi agen perubahan di lingkungan kerjanya kelak, terutama dalam hal

Mengutip perkataan bijak dari Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid yang mengatakan bahwa semakin tinggi ilmu seseorang maka akan semakin besar rasa toleransinya. Ilmu bisa didapat dimana saja. Demikian halnya dengan program SBKK. Di sini para peserta bisa mendapatkan atau juga menyegarkan kembali ilmu yang pernah didapat tentang toleransi. Sehingga diharapkan selepas program ini, mereka dapat menyebarkan nilai-nilai toleransi yang telah didapat kepada masyarakat sekitar di manapun mereka berada.



FOTO : SENO ADI NUGROHO

Kegiatan SBKK ini bermula dari pertemuan relawan dari SabangMerauke dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Gala Dinner Alumni LPDP, 17 Januari 2018 lalu. Arahan Menteri Keuangan pada saat ini salah satunya adalah membuat *pilot project* pertukaran pelajar di Kemenkeu.

Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, program pertukaran pelajar tahun 2018 ini bekerja sama dengan yayasan SabangMerauke. SabangMerauke adalah yayasan yang dicetuskan untuk menanamkan nilai toleransi sejak dini. Berdiri pada tahun 2012, yayasan ini mengusung *tagline* "Karena toleransi tidak bisa hanya diajarkan, toleransi harus dialami dan dirasakan". Program utama yang diusung SabangMerauke adalah pertukaran pelajar antardaerah

toleransi. Selanjutnya, kemungkinan bagi para lulusan tersebut untuk mendapatkan penempatan di tempat yang berbeda budaya dengan latar belakang budaya mereka sangat besar. Rahmadi merasa apabila para pegawai memiliki nilai toleransi yang tinggi maka resistensi pegawai untuk ditempatkan di wilayah yang berbeda latar belakang budayanya akan menurun. "Bayangkanlah kalau orang-orang yang terbiasa menghadapi perbedaan ditaruh misalnya di Papua, kan awalnya langsung resistensi saja, tetapi kalau dari awal mereka sudah tahu, oh mereka nih sama dengan kita cuma berbeda cara hidupnya. Saya yakin akan menikmati hidup di sana, dan akan bisa mengembangkan daerah tempat mereka," tambahnya.



FOTO : SENO ADI NUGROHO

Pagi itu, sebuah bus terlihat merapat ke Gereja Tugu, sebuah gereja bersejarah yang berlokasi di Kampung Tugu, Cilincing, Jakarta Utara. Segerombolan anak keluar dari bus dan bergegas masuk ke dalam gereja. Di dalam gereja, seorang pria paruh baya yang merupakan perwakilan dari gereja tersebut menyambut anak-anak itu dengan ramah dan mempersilahkan mereka untuk duduk. Selama beberapa menit berikutnya, anak-anak tersebut dengan tenang menyimak perwakilan dari gereja tersebut yang sedang berbicara di depan. Bukan, mereka tidak sedang menjalankan ibadah. Anak-anak tersebut adalah para peserta dari kegiatan Seminggu Bersama Keluarga Kemenkeu (SBKK) yang sedang mengikuti salah satu rangkaian kegiatan SBKK.

Kegiatan SBKK merupakan acara yang dirancang khusus oleh Kementerian Keuangan untuk menanamkan rasa toleransi, khususnya di lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam pelaksanaannya, Kementerian Keuangan, dalam hal ini diwakili oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) selaku penyelenggara kegiatan, bekerja sama dengan tim SabangMerauke. Kegiatan SBKK ini sendiri merupakan adaptasi dari kegiatan serupa yang bernama SabangMerauke, yang

RIDWAN SIDIK KURNIAWAN

SEBUAH KEBERSAMAAN YANG MELAHIRKAN TOLERANSI

merupakan akronim dari 'Seribu Anak Bangsa Merantau Untuk Kembali'. Karena SBKK didesain khusus untuk Kementerian Keuangan, tentunya telah dilakukan beberapa penyesuaian dari kegiatan aslinya, baik dari segi waktu maupun materi. Misalnya, jika kegiatan SabangMerauke ini berlangsung selama 3 minggu, maka SBKK hanya dilaksanakan selama 1 minggu saja, yakni pada tanggal 8 s.d. 15 Juli 2018.

Sama seperti SabangMerauke, peserta SBKK dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu adik SBKK, kakak SBKK, dan famili SBKK. Sebelum acara SBKK berjalan, terlebih dahulu dibuka pendaftaran untuk menjaring peserta yang berminat mengikuti acara ini. Syarat untuk mendaftar berbeda-beda tiap kategori. Adik SBKK, dibuka untuk para pelajar yang sedang duduk di bangku SMP dari seluruh wilayah Indonesia. Kakak SBKK dibuka untuk mahasiswa PKN STAN. Sedangkan untuk famili SBKK ditawarkan kepada para pejabat eselon II ke atas di lingkungan Kementerian Keuangan yang berdomisili di wilayah Jabodetabek. Peserta yang telah mendaftar kemudian diseleksi sebelum ditetapkan menjadi peserta SBKK. Khusus untuk Kakak SBKK, diwajibkan untuk mengikuti induksi yang diselenggarakan sebelum kegiatan SBKK dimulai.

Kegiatan SBKK resmi dimulai dengan acara pembukaan yang dilaksanakan di Pusdiklat Pajak. Dalam acara pembukaan ini, ketiga pihak (adik, kakak, dan famili) untuk pertama kalinya dipertemukan dan menjadi sebuah 'keluarga'. Sebanyak 13 keluarga SBKK tercatat mengikuti kegiatan ini. Artinya, ada 13 pejabat Kementerian Keuangan yang ikut ambil bagian dalam kegiatan ini. Tidak hanya pejabat eselon I,



II, dan staff ahli saja, bahkan Wakil Menteri Keuangan turut berpartisipasi menjadi famili SBKK. Setelah acara pembukaan selesai, baik adik maupun kakak SBKK ikut pulang ke rumah famili barunya masing-masing.

MEMAHAMI PERBEDAAN

Menumbuhkan toleransi adalah tujuan utama dari kegiatan SBKK, sebagaimana juga seperti yang dilakukan dalam kegiatan SabangMerauke. Sikap intoleransi terkadang dapat terjadi karena kurangnya pemahaman antara satu kelompok individu dengan kelompok lainnya. Oleh karena itu, sejak awal para peserta SBKK dikondisikan untuk dapat berbaur dengan teman-teman lain yang memiliki latar belakang agama dan suku yang berbeda-beda. Selain itu, pembagian pasangan adik, kakak, dan famili SBKK pun dilakukan secara acak. Artinya dalam satu keluarga SBKK dapat terdiri dari adik, kakak, dan famili yang memiliki keyakinan dan atau suku yang berbeda.

Selama satu minggu penuh, adik dan kakak SBKK mengikuti kegiatan sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan. Sebagian besar agenda dipandu langsung oleh para

relawan dari SabangMerauke. Kegiatan yang dilaksanakan pun bervariasi dan tidak hanya dilakukan di satu tempat saja. Pada hari pertama, mereka diajak ke Taman Mini Indonesia Indah untuk mengikuti berbagai macam aktivitas. Hari kedua, kegiatan dilaksanakan di Cilincing, Jakarta Utara dengan mendatangi berbagai tempat ibadah. Hari ketiga, kegiatan dilaksanakan di Sekretariat BPPK Purnawarman. Hari keempat, lokasi kegiatan berpindah ke PKN STAN. Dan di hari kelima, mereka diajak untuk ikut ke kantor familinya masing-masing. Mayoritas kegiatan tersebut dilaksanakan dari pagi sampai sore hari. Setelah kegiatan selesai, mereka kembali ke tempat famili-nya masing-masing.

Dari semua kegiatan yang ada, bisa dikatakan agenda pada hari kedua sangat berperan besar dalam usaha menumbuhkan toleransi kepada para peserta SBKK. Seperti yang sempat disinggung di awal, pada hari tersebut para peserta dibawa ke daerah Cilincing untuk mengunjungi rumah ibadah. Tidak hanya berkunjung ke satu tempat ibadah saja, pada hari itu mereka secara bergantian mendatangi 5 tempat ibadah yang berbeda. Pada masing-masing tempat ibadah, mereka disambut



FOTO : MUHAMMAD FATH

oleh perwakilan dari tempat ibadah setempat untuk kemudian memberikan penjelasan tentang agama sesuai dengan tempat ibadah yang sedang mereka kunjungi. Selain itu, terdapat juga sesi tanya jawab dimana para adik dan kakak SBKK yang memiliki keyakinan yang beragam diberikan kesempatan bertanya kepada perwakilan dari tempat ibadah tersebut. Dengan lebih mengenal agama-agama lain di luar agama mereka sendiri, diharapkan para peserta SBKK menjadi lebih tercerahkan dan dapat menepis berbagai prasangka negatif hanya karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap agama lain, karena pada dasarnya semua agama mengajarkan tentang kebaikan dan perdamaian.

Selain melalui kegiatan yang telah dirancang oleh tim relawan, peran famili juga tidak kalah penting dalam usaha penanaman rasa toleransi kepada para adik dan kakak SBKK. Sebagai keluarga sementara, famili tidak hanya sekedar berfungsi sebagai 'tempat menginap' saja, melainkan juga harus berperan sebagai pembimbing yang baik untuk para adik dan kakak SBKK.

BERTEMU MENTERI KEUANGAN

Puncak kegiatan SBKK berlangsung pada hari kelima melalui acara makan malam yang diselenggarakan di Sekretariat BPPK. Acara yang bertema 'Main Ke RumahKeu' tersebut tidak hanya diikuti oleh para peserta SBKK, namun juga turut mengundang para peserta dari SabangMerauke beserta tim relawan karena kebetulan jadwal SBKK bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan SabangMerauke. Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, SabangMerauke adalah kegiatan yang menginspirasi lahirnya SBKK.

Hal yang membuat acara malam itu menjadi spesial adalah kehadiran Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati beserta jajaran pimpinan Kementerian Keuangan. Dalam acara tersebut, Sri Mulyani memberikan kesempatan kepada para peserta, baik dari SBKK maupun SabangMerauke, untuk menceritakan pengalamannya selama mengikuti kegiatan ini.

Indy, salah satu adik SBKK yang berasal dari Bali bercerita bahwa pada awalnya dirinya bimbang untuk mengikuti kegiatan ini. Pasalnya, pelaksanaan SBKK berbarengan dengan jadwal kegiatannya yang lain yang tak kalah penting. Setelah mengaku sempat menangis karena bingung, akhirnya ia memutuskan untuk memilih untuk mengikuti SBKK. Saat ditanya apakah ia menyesal dengan keputusannya tersebut, Indi menggeleng. "Enggak nyesel sih, karena bertemu dengan

teman yang baik-baik *banget*, sama kakak-kakak yang baik-baik *banget* dan *dapet* keluarga yang dapat menerima Indi juga,” terangnya. Adapun keluarga yang dimaksud Indi adalah keluarga Rahmadi Murwanto, Direktur PKN STAN saat ini.

Berbeda dengan Indy, Dini yang merupakan salah satu adik SabangMerauke mengisahkan pada awalnya banyak teman-temannya yang mempertanyakan keinginannya untuk mengikuti kegiatan ini. “Awalnya ikut program ini, banyak teman-teman yang menanyakan kenapa harus ikut yang seperti ini. Kenapa mau tinggal dengan orang yang berbeda keyakinan dan budaya sama kamu,” terang Dini.

“Dan mereka *ngomong* gitu, itu bukan jadi hambatan, bukan menjadi ketakutan tersendiri buat saya. Itu menjadi pendorong agar saya bisa lebih maju dan saya bisa membuktikan bahwa yang mereka katakan itu tidak benar, persepsi mereka itu tidak benar,” lanjutnya.

Menanggapi cerita dari anak-anak SBKK dan SabangMerauke, Sri Mulyani berpesan bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki hati dan pikiran yang baik. Namun seringkali karena ketidaktahuan terhadap sesuatu, yang kemudian muncul kemudian adalah prasangka, yang mayoritas adalah prasangka negatif. Untuk itu, Ia mengajak anak-anak tersebut untuk lebih mengenal dan memahami perbedaan yang ada.

“Kita melihat hanya dari cerita kecil ini saja, ternyata yang selama ini kita anggap, penampilan, atau nama, atau bajunya, atau agamanya, atau sukunya itu yang menyebabkan kita punya halangan untuk (saling) mengenal,” terangnya.

Pada kesempatan tersebut, Sri Mulyani juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan SBKK, termasuk

BPPK dan yayasan SabangMerauke yang menginisiasi diadakannya SBKK. Sejak pertama kali mendengar mengenai kegiatan SabangMerauke, Sri Mulyani memang langsung tertarik dan meminta agar kegiatan serupa dapat diselenggarakan di Kementerian Keuangan. Ke depannya, Sri Mulyani berharap dapat SBKK dapat kembali diselenggarakan dengan peserta yang lebih banyak lagi. “Nanti kita coba meng-*introduce* ini (SBKK) lebih lebar lagi, mungkin kita bisa pikirkan. Pak Rio tolong dikembangkan!” perintah Sri Mulyani kepada kepala BPPK yang baru.

Kegiatan SBKK akhirnya resmi ditutup pada hari Minggu, tanggal 15 Juli 2018 di PKN STAN yang berbarengan dengan dilaksanakannya acara Dies Natalies PKN STAN di lokasi yang sama. Menteri Keuangan, Sri Mulyani kembali menunjukkan dukungannya terhadap acara SBKK dengan menutup kegiatan tersebut secara langsung.

“Kita melihat hanya dari cerita kecil ini saja, ternyata yang selama ini kita anggap, penampilan, atau nama, atau bajunya, atau agamanya, atau sukunya itu yang menyebabkan kita punya halangan untuk (saling) mengenal.”

ARIMBI PUTRI

Tangis dan Tawa dalam SBKK

RAHMADI: *“LIVE IN SIMPLICITY, BUT NEVER IN PRETENSE”*



FOTO : SENO ADI NUGROHO

Tangis Adriana Karolina Butter atau yang akrab disapa Noni pecah ketika diminta menceritakan pengalaman pascapelaksanaan Seminggu Bersama Keluarga Kemenkeu (SBKK). Noni yang awalnya ragu mengikuti program ini, tak menyangka akan sedekat, serindu itu dengan anak asuhnya yang kini berseberangan pulau. Hingga kini, istri Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN), Rahmadi Murwanto, tersebut masih kerap berkontak dengan Indy dan Bella, Adik dan Kakak SBKK yang tinggal sepekan di kediamannya.

Kedatangan anggota baru yang asing selama seminggu dalam keluarga tentunya memberikan kesan tersendiri. Khawatir, cemas, takut, penuh prasangka, sekaligus bersemangat berkecamuk menjadi satu sebelum kehadiran Adik-Kakak SBKK. Beruntung, keluarga Rahmadi kehadiran anak-anak yang sudah terbuka pola pikirnya.

Bahkan, Noni mengaku banyak sekali belajar dari Indy yang berasal dari Pulau Dewata. Salah satunya ketika Indy mencuci pakaian dalamnya sendiri. Noni meminta Indy untuk menjemurnya di atas, namun Indy menolak dengan alasan hal tersebut kurang sopan dilakukan.

“Karena kita punya saudara ari-ari. Ari-ari itu *kan* di atas, sedangkan pakaian dalam di bawah *kan*, jadi kita harus menghargai saudara ari-ari kita. Jadi di situlah saya, wow luar biasa sekali. Wah anak ini masih kecil, orang tuanya hebat *ngajarin* anaknya bagaimana hal-hal kecil itu harus dihormati, dipelajari. Dari hal-hal kecil itu kan dia juga bisa menghargai orang lain,” tutur Noni menirukan ucapan Indy kala itu.

Keluarga Rahmadi khususnya, tidak memiliki kekhawatiran terkait perbedaan etnis, budaya, maupun keyakinan, karena keluarganya sendiri sudah sangat heterogen. Mereka lebih banyak beradaptasi terhadap budaya di rumah karena Rahmadi dan Noni tidak memiliki anak perempuan. Di sisi lain, mereka sangat menikmati kehadiran Adik-Kakak SBKK, terlebih Indy memiliki hobi yang sama dengan keluarga Rahmadi, yakni bermain musik.



FOTO : EKO SUPRIYONO & MUHAMMAD FATH

Kemampuan bermain musik itulah yang juga menjadi jembatan bagi mereka untuk dekat satu sama lain, terutama dengan kedua anak laki-laki Rahmadi. Noni pun tak menyangka anak-anaknya mampu sedekat itu dengan keluarga barunya, bahkan menganggap mereka seperti adik sendiri. Karena sudah dianggap sebagai keluarga sendiri, para peserta SBKK merasa kegiatan ini terlalu singkat dan membutuhkan waktu lebih untuk berkumpul bersama.

“Ibu ngerasa aduh kuraaang, jangan pulang. Akhirnya kami buat grup whatsapp ya, jadi komunikasi kami sampai sekarang masih terjaga. Sekarang pun kalau ingat anak-anak itu masih nangis, kangen banget,” ungkap Noni yang mulai menitikkan air mata.

Tak hanya Noni, Kakak-Adik SBKK itu pun kompak mengungkapkan kerinduannya dengan keluarga singkat mereka. Setiap hari mereka saling bertegur sapa, mengirimkan kalimat-kalimat penyemangat, atau saling berbagi foto. Bella, Kakak SBKK dari PKN STAN yang mendampingi Indy pun sering mampir ke rumah Rahmadi sekadar bersilaturahmi.



“Ya, saya juga *nggak* nyangka kalau anak saya juga menikmati. Saya senang meski seminggu itu saya sibuk, tapi istri dan anak-anak saya seminggu itu bisa senang ada keluarga baru di rumah. Kecapekan saya selama seminggu tidak sia-sia,” urai Rahmadi.

Selain kebersamaan, mereka juga sangat merasakan manfaat toleransi yang didapat dari program ini. Peserta pun kerap membagikan manfaat yang didapatnya melalui media sosial pribadi, atau berdiskusi dengan teman-teman sebayanya.

“Pertama sih Indy bisa ngasih tau temen tentang indahnya perbedaan karena di sekolah tuh banyak orang *bully-bully*, jadi mereka tuh masih pemikirannya masih sempit gitu lho kak. Indy juga nyeritain program SBKK ke temen-temen Indy, terus mau ngasih cerita ke adik-adik SD juga,” ungkap Indy.

Untuk pelaksanaan ke depannya, Rahmadi berharap para peserta SBKK ini justru yang memiliki permasalahan dengan toleransi agar manfaat yang dirasakannya lebih optimal. Tidak hanya yang memiliki praduga tertentu soal suku, ras, atau agama, tetapi juga masalah perbedaan ekonomi. Rahmadi berpendapat, peserta dapat dipilih yang kondisi ekonominya menengah ke bawah.



FOTO : DOK. PRIBADI

“Kita bisa menunjukkan bahwa kita itu hanya beda penghasilan aja, tetapi segala sesuatu sama, itu juga penting. Karena apa, biasanya kan masalah *prejudice* ya biasanya terkait karena latar belakang ekonomi juga. Orang yang latar ekonominya lemah dan jarang terpapar kebinekaan, dia cenderung tidak toleran,” kata dia.

Meski tergolong singkat, pelaksanaan SBKK mampu memberikan kesan mendalam bagi para pesertanya. Baik Kakak, Adik, maupun keluarga asuh sepakat program ini harus terus dilanjutkan, karena tidak hanya menginspirasi satu orang, tetapi juga menginspirasi orang-orang di sekitar mereka.

“Selain pelajaran yang terkait dengan toleransi, pendidikan, dan kebinekaan, bertemu dan berinteraksi dengan tokoh-tokoh penting di Kementerian Keuangan memberikan harapan yang besar baik untuk Kakak maupun Adik tentang masa depan mereka. Memberikan harapan bahwa suatu saat kami juga bisa memberikan kontribusi besar untuk Indonesia, seperti bapak dan ibu yang kami temui di program ini,” tutup Bella.

“Selain pelajaran yang terkait dengan toleransi, pendidikan, dan kebinekaan, bertemu dan berinteraksi dengan tokoh-tokoh penting di Kementerian Keuangan memberikan harapan yang besar baik untuk Kakak maupun Adik tentang masa depan mereka.”



HERU WIBOWO

MELIHAT DARI DEKAT PELATIHAN PENINDAKAN & SERTIFIKASI AHLI KEPABEANAN



FOTO : DOK. PUSDIKLAT BC

Pusdiklat Bea dan Cukai, sebagai salah satu unit Eselon II di bawah Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat besar dalam mengembangkan sumber daya manusia (SDM), terutama pengelola keuangan negara di bidang kepabeanan dan cukai. Hal ini sejalan dengan fungsi BPPK sebagai pengelola pendidikan dan pelatihan di lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam menjalankan peran tersebut, Pusdiklat Bea dan Cukai menetapkan visi **“Menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan terkemuka yang menghasilkan pengelola keuangan negara di bidang kepabeanan dan cukai yang berkelas dunia.”**

Untuk mendukung pelaksanaan visi tersebut, Pusdiklat Bea dan Cukai memiliki tugas yaitu membina pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang bea dan cukai berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala BPPK. Pada tahun 2018, untuk memenuhi kebutuhan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai *stakeholder* utama, Pusdiklat Bea dan Cukai memiliki 69 program pelatihan, yang terdiri dari 3 (tiga) pelatihan mandatori, 38 (tiga puluh delapan) pelatihan teknis, 4 (empat) pelatihan fungsional dan 24 (dua puluh empat) lokakarya.

Jenis-jenis pelatihan di Pusdiklat Bea dan Cukai tidak bisa lepas dari misi yang diemban oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai *stakeholder*. Misi yang diemban DJBC yaitu memfasilitasi perdagangan dan industri, menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal, serta mengoptimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai. Secara garis besar program diklat di Pusdiklat Bea dan Cukai terbagi dalam rumpun

prosedur dan fasilitas kepabeanan dan cukai, pengawasan kepabeanan dan cukai, pelayanan kepabeanan dan cukai, pengawasan keuangan, serta manajemen SDM. Namun demikian, mayoritas pelatihan di Pusdiklat Bea dan Cukai lebih banyak terkait dengan prosedur fasilitas serta pengawasan kepabeanan dan cukai. Contoh pelatihan terkait dengan prosedur dan fasilitas antara lain Pelatihan Teknis Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat (TPB), Pelatihan Teknis Cukai Lanjutan dan Pelatihan Teknis Pelayanan Administrasi Manifes. Untuk pelatihan terkait pengawasan kepabeanan dan cukai antara lain: Pelatihan Teknis Pemeriksaan Sarana Pengangkut Udara, Pelatihan Teknis Pemeriksaan Barang Penumpang, dan Pelatihan Teknis Penindakan Kepabeanan dan Cukai.

PELATIHAN PENINDAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Tantangan yang dihadapi oleh DJBC sebagai *stakeholder* utama Pusdiklat Bea dan Cukai dalam menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal termasuk narkoba semakin meningkat. Untuk itu, Pusdiklat Bea dan Cukai terus mengembangkan kurikulum dan mendesain program-program pelatihan dalam menunjang tugas pengawasan kepabeanan dan cukai. Salah satu pelatihan yang berhubungan dengan hal tersebut adalah Pelatihan Penindakan Kepabeanan dan Cukai yang selanjutnya sering disebut dengan Pelatihan Teknis CET (*Customs Enforcement Team*). Dalam Kerangka Acuan Program (KAP) disebutkan bahwa pelatihan ini akan memberikan materi **dasar-dasar pengawasan, intelijen dan prapenindakan, teknik penindakan darat, laut, udara, teknik komunikasi dan psikologi pemeriksaan**. Metode yang digunakan dalam penyampaian materi pelatihan lebih menitikberatkan pada kegiatan praktik.

Tenaga pengajar Pelatihan CET sebagian besar berasal dari Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC serta tim pelatih dari Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD. Para pengajar membagi ilmu dan pengetahuan terkait penindakan dengan cara interaktif di kelas maupun dengan memberikan pendampingan dalam praktik dan simulasi di luar kelas. Peserta pelatihan mendapatkan pembekalan di dalam kelas tentang sejarah dan konsep CET, ketentuan penindakan di bidang kepabeanaan maupun cukai, dan analisis targeting serta dasar-dasar *surveillance*. Materi di kelas selanjutnya dikolaborasikan dengan praktik, diantaranya praktik-praktik teknik penindakan. Dengan adanya praktik, diharapkan para peserta Pelatihan CET dapat mengenal berbagai macam teknik penindakan di darat, laut, maupun udara.

Dalam praktik penindakan di darat, para peserta CET akan belajar bagaimana melakukan *safety driving*, pengejaran target hingga menguasai teknik penghentian sarana pengangkut. Untuk praktik penindakan di laut, peserta dibekali materi terkait pengenalan kapal dan alat-alat navigasi. Peserta harus memahami bagian-bagian kapal, teknik pemeriksaan kapal, dan juga harus dapat membaca arah peta dan kompas. Untuk lebih meningkatkan pemahaman, peserta juga dilatih dalam praktik operasi/patrol laut secara langsung di Pangkalan Sarana Operasi (PSO) Bea dan Cukai Tanjung Priok.

Selain teknik-teknik penindakan sarana pengangkut, peserta juga dibekali kemampuan agar dapat melakukan teknik komunikasi yang baik, terutama dalam hal praktik pengendalian massa. Hal ini penting untuk dapat meredam gejolak demo maupun amuk massa yang suatu saat bisa terjadi ketika melakukan penindakan. Dalam melakukan penindakan, pegawai Bea dan Cukai diizinkan menggunakan senjata api, sehingga pengenalan senjata merupakan hal yang wajib dipelajari, termasuk praktik menembak dengan didampingi tim pelatih Kopassus TNI AD. Lokasi yang digunakan berada di lapangan tembak kawasan Ciampea, Bogor.

Pelatihan CET ini tidak hanya diikuti oleh para pegawai pelaksana di lingkungan DJBC. Pelatihan diselenggarakan juga untuk para pejabat dalam bentuk program Lokakarya CET dan Lokakarya CET Kehormatan. Lokakarya CET diikuti oleh para pejabat eselon IV yang ditunjuk dan direkomendasikan oleh Sekretaris DJBC. Jika Lokakarya CET diperuntukkan bagi pejabat eselon IV, maka program Lokakarya CET Kehormatan diikuti oleh minimal pejabat eselon III. Bahkan pada pelaksanaannya pernah diikuti langsung oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Bapak Heru Pambudi. Puncak dari seluruh kegiatan pelaksanaan Pelatihan, Lokakarya, dan Lokakarya kehormatan CET adalah penutupan dan penyematan brevet CET. Penutupan digelar di lapangan tembak Ciampea Bogor dengan menyanyikan lagu kebangsaan dan mencium bendera Merah Putih sebagai tanda komitmen kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain Pelatihan, Lokakarya, dan Lokakarya Kehormatan CET, Pusdiklat Bea dan Cukai juga menyelenggarakan Pelatihan Teknis *Special Enforcement Team* (SET). Hal ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan DJBC dalam menghadapi perkembangan situasi dan kondisi pelanggaran yang membutuhkan penanganan khusus. Penanganan

khusus ini bisa muncul karena sifatnya yang strategis, skala nasional dan/atau mendapat perhatian publik. Situasi dan kondisi dimaksud terkadang bersifat mendesak. Untuk itu, secara *ad hoc* dapat dibentuk Satuan Tugas Khusus Penindakan (*Special Enforcement Team*) yang beranggotakan pegawai dengan kualifikasi dan kompetensi khusus pula.

Dalam Pelatihan Teknis SET, peserta mendapatkan pembekalan materi terkait *excellence team work*, bela diri, menembak, tindakan persuasif dan juga simulasi operasi penindakan. Sama halnya dengan Pelatihan CET, dalam Pelatihan SET ini peserta akan banyak mendapatkan pembelajaran melalui metode praktik. Porsi praktik bela diri dan menembak dalam pelatihan ini lebih ditingkatkan karena diharapkan lulusannya nanti benar-benar menjadi unit penindakan yang spesial. Tentu saja semua pelatihan di Pusdiklat Bea dan Cukai diharapkan menghasilkan lulusan yang terbaik. Termasuk juga dengan Pelatihan CET dan SET ini, diharapkan mempunyai pengaruh yang besar terhadap peningkatan kompetensi para pegawai DJBC. Selain menyelenggarakan pelatihan, Pusdiklat Bea dan Cukai juga mempunyai beberapa tugas lainnya. Tugas tersebut yaitu melaksanakan sertifikasi kompetensi



di bidang kepabeanaan dan cukai. Sertifikasi kompetensi yang dilakukan Pusdiklat Bea dan Cukai yaitu Sertifikasi Ahli Kepabeanaan (SAK). Berdasarkan Peraturan Kepala BPPK Nomor PER-02/PP/2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala BPPK Nomor PER-01/PP/2016 tentang Pedoman Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanaan, SAK dilaksanakan oleh Tim Penguji yang berkedudukan di Pusdiklat Bea dan Cukai, Jakarta.

Kantor Pabeaan dapat dilakukan sendiri oleh importir atau eksportir. Dalam hal tidak dilakukan sendiri, importir atau eksportir dapat menugaskan atau menguasakannya kepada sebuah badan usaha yang disebut Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanaan (PPJK). Salah satu syarat yang harus dipenuhi PPJK untuk mendapatkan Akses Kepabeanaan adalah memiliki minimal 1 (satu) orang Ahli Kepabeanaan.

Setiap calon peserta ujian wajib memenuhi persyaratan yang diatur dalam PER-02/PP/2015 jo. PER-01/PP/2016 dan wajib melakukan penyetoran biaya ujian sebesar Rp1.000.000,00 untuk 1 kali keikutsertaan. Biaya ini sesuai dengan tarif PNBP yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif PNBP yang Berlaku pada Kementerian Keuangan.

Pusdiklat Bea dan Cukai berkomitmen untuk menghasilkan Ahli Kepabeanaan yang benar-benar kompeten. Soal ujian disusun dengan mengacu pada kondisi dan peraturan terkini, melalui proses validasi bertahap untuk memberikan garansi bahwa peserta yang lulus adalah para Ahli Kepabeanaan yang benar-benar menguasai proses bisnis ekspor impor serta mampu melaksanakan kewajiban pabeaan dengan baik dan benar. Apabila Ahli Kepabeanaan bekerja dengan baik diharapkan arus ekspor dan impor barang menjadi lebih lancar dan para pengguna jasa PPJK dapat menyelesaikan kewajiban pabeannya tepat waktu.

Perlu diketahui bahwa Pusdiklat Bea dan Cukai hanya menyelenggarakan proses Sertifikasi Ahli Kepabeanaan, dan tidak menyelenggarakan pelatihan maupun kursus terkait dengan sertifikasi tersebut, sehingga Tim Penguji bekerja secara netral dan tidak terlibat dalam konflik kepentingan dengan para peserta ujian.

Menilik data penyelenggaraan ujian 5 tahun terakhir, sejak 2014 tercatat 7.110 orang peserta telah mengikuti ujian, dan 1.924 orang diantaranya (27,06%) telah berhasil lulus ujian dan mendapatkan Sertifikat Ahli Kepabeanaan.



SERTIFIKASI AHLI KEPABEANAAN

SAK merupakan serangkaian proses yang dilakukan oleh Tim Penguji Ahli Kepabeanaan mulai dari pelaksanaan pendaftaran ujian, pelaksanaan ujian, sampai dengan penyerahan Sertifikat Ahli Kepabeanaan yang dikeluarkan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). Orang yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang kepabeanaan dan memiliki Sertifikat Ahli Kepabeanaan disebut sebagai Ahli Kepabeanaan (PMK Nomor 179/PMK.04/2016 tentang Registrasi Kepabeanaan).

Mengapa diperlukan seorang Ahli Kepabeanaan? Karena sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan menyebutkan bahwa pengurusan pemberitahuan pabeaan di

Dalam satu tahun anggaran, Pusdiklat Bea dan Cukai menyelenggarakan tiga kali ujian, yakni pada bulan Februari, Juni, dan Oktober atau pada bulan lain setelah mendapatkan persetujuan Kepala BPPK. Ujian diselenggarakan di Jakarta maupun kota-kota lain yang ditetapkan oleh Tim Penguji berdasarkan sebaran peserta ujian. Ujian dilaksanakan secara *paper based* dalam dua sesi dengan durasi setiap sesi adalah 75 menit. Ujian sesi pertama dilaksanakan untuk mengukur pemahaman peserta dalam hal peraturan kepabeanaan, proses bisnis ekspor impor serta pengetahuan terkait identifikasi dan klasifikasi barang. Sedangkan ujian sesi kedua dilaksanakan untuk mengukur kemampuan peserta dalam menghitung nilai pabeaan serta melakukan identifikasi dan klasifikasi barang. Khusus sesi kedua diperkenankan membuka Buku Tarif Kepabeanaan Indonesia (BTKI) dan menggunakan kalkulator *non-scientific*.

RIONALD SILABAN

“Sang Pembelajar Tanpa Henti”

DODI SEPTARIZA

Education is not preparation for life; education is life itself –John Dewey-
Kalimat bijak tersebut rasanya pas untuk menggambarkan perjalanan hidup dan karier laki-laki kelahiran Pekanbaru, 52 tahun silam ini. Selain pendidikan formal di bangku sekolah, baginya kehidupan sosial dan pekerjaan merupakan proses pembelajaran yang “sebenarnya”. Tidak salah jika akhirnya pengalaman dan berbagai jabatan yang diembannya meninggalkan jejak perjalanan yang menginspirasi.

Bicara tentang masa muda Rionald Silaban, tidak beda dengan masa muda kaum milenial. Besar di ibukota, membuat Rio terbiasa dengan pergaulan di zamannya. Namun demikian ia tetap *on the track* menyelesaikan pendidikannya. Ini semua berkat prinsip orangtuanya yang mengutamakan pendidikan bagi anak-anaknya dan selalu meluangkan waktu memberikan pengarahannya agar mereka dapat mengambil keputusan yang tepat untuk masa depan.

Jelang kuliah, Rio memilih berkuliah di Fakultas Hukum, Universitas Indonesia. Tidak dapat dipungkiri, pilihannya tersebut sedikit banyak dipengaruhi kehidupan sehari-hari ayahnya yang berprofesi sebagai jaksa. Namun siapa sangka, keputusannya untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS) selepas kuliah justru diragukan ayahnya sendiri. Maklum saja, kala itu gaji PNS terbilang rendah. Namun hal itu tidak mengurungkan niatnya karena Rio sudah mempunyai perhitungannya sendiri. Ia berhitung bahwa kalau ia diterima di Depkeu, peluangnya untuk melanjutkan kuliah di luar negeri akan terbuka lebar.

Saat melamar untuk CPNS Kementerian Keuangan (dahulu Departemen Keuangan/Depkeu), ia juga melamar pada salah satu perusahaan swasta terbesar di Indonesia. Rio pun diterima lebih dulu di perusahaan itu sebagai *management trainee* setelah menyisihkan ribuan pelamar lainnya. Sempat menjalani waktu pendidikan selama tiga bulan di perusahaan tersebut, Rio ternyata masih ingin menjadi PNS. Hingga akhirnya diumumkan bahwa Rio diterima di

Departemen Keuangan, ia membulatkan tekad untuk meninggalkan perusahaan tersebut. Awalnya, Rio tidak diizinkan untuk mengundurkan diri dari perusahaan. Namun ia mendapat dukungan dari mantan dosennya yang juga merupakan Kepala Biro dan Humas Depkeu, hingga akhirnya ia diperbolehkan untuk meninggalkan perusahaan.

Meskipun hanya bergabung selama tiga bulan di perusahaan, ia mengaku belajar banyak hal, salah satunya adalah tentang sikap menghormati. Dirinya berkisah, pada suatu hari dimasa pendidikan Rio hampir terlambat menuju kelas. Seketika dirinya memacu kendaraannya dengan cepat sampai sampai tidak menggubris sapaan satpam ketika masuk. Pada saat kelas dimulai ia pun terkejut. Instrukturnya menegur Rio karena tidak membalas sapa dari satpam. Peristiwa kecil tersebut sangat membekas dihati Rio, dan dari sana ia belajar untuk menghargai orang lain tanpa pandang bulu. “Makanya, saya ingin kita kepada siapa saja bisa saling tegur sapa, walaupun misal satpam hanya bantu sebentar untuk buka pintu, tapi *we have to look in their eyes*, dan bilang terima kasih, itu yang namanya *respect*,” tegasnya.

HAL KECIL YANG MENGUBAH HIDUP

Diangkat sebagai CPNS pada tahun 1990, Rio langsung mendapatkan kesempatan meneruskan pendidikan ke Amerika Serikat pada tahun 1992. Saat menempuh pendidikan di Georgetown University, Washington, AS, ia tinggal di satu unit apartemen bersama tiga pemuda Indonesia lainnya, salah satunya adalah mantan Menteri ESDM, Sudirman Said. “Beasiswa itu terbatas, kami berempat menyewa apartemen 2 kamar, Pak Hamdan

dari Kemenpar, Almarhum Pak Soegianto dari DJA, Sudirman Said dari BPPK dan saya yang paling muda. Saya memilih untuk tidur di *living room*, dan *sofa bed* jadi tempat tidur saya. Dirman (Sudirman Said) itu keahliannya memasak bakwan dari Indomie, hehehe, kenang Rio sambil tertawa. Belajar dari tempat kerja pertamanya untuk senantiasa menghargai siapa pun, Rio menjalin hubungan yang sangat baik dengan para teman seangkatannya. “Kami memiliki grup WA untuk bisa bertukar sapa,” tambahnya.

Dari pengalamannya itu Rio menyampaikan pesan kepada generasi muda, “Saya ingin berbagi kepada generasi milenial, dan hal ini sudah saya buktikan sangat berpengaruh terhadap perjalanan hidup saya, *friends are the family you choose*. Walaupun titik mulai kita sama, *eventually you will have a different walk of life. different achievements, but friendship stays*. Bahkan ketika kita mempunyai perbedaan pandangan.”

Setelah menyelesaikan pendidikan pasca sarjananya, Rio kembali pada rutinitas pekerjaannya di Biro Hukum Sekretaris Jenderal. Meskipun pekerjaan, tempat kerja, jabatan mungkin bisa sama antara satu dan lainnya, tapi Rio percaya cara seseorang menyikapi suatu pekerjaan akan menjadi pembeda antara orang tersebut dengan pegawai lainnya.

Rio tidak pernah menganggap jam kerja terpaku pada angka 7 sampai dengan 17. Menurut dia, tidak jarang di pagi hari beban pekerjaan masih ringan namun menjelang sore beban semakin padat.



FOTO : ABDUL 'AZIZ MAGHFUR

“Lewat pekerjaan kita bisa mengambil pelajaran bahwa hidup itu penuh dengan perbedaan, hidup itu kaya.”

Setidaknya, inilah yang terjadi saat Rio bekerja dulu.

Ketika ia berangkat sekolah, atasannya adalah Bacelius Ruru. Namun sekebalinya dari sekolah, ia mempunyai atasan baru yang bernama Agus Haryanto. “Saya tidak kenal beliau sebelumnya. saya hanya ingin bekerja sebaik-baiknya. Pada saat itu, saya mengamati bahwa atasan, sering sekali bekerja setelah lewat pukul 17.00. Pada jam kerja normal, atasan menghadiri rapat dengan pejabat atau unit kerja lain. Sering kali Pak Agus Haryanto mulai bekerja lagi setelah jam 17.00 sekebalinya dari rapat-rapat yang dihadiri dengan membawa tugas-tugas yang perlu segera diselesaikan,” kenang Rio. Sebagian besar pegawai tentu sudah memutuskan untuk pulang ketika jam kerja berakhir, tapi tidak demikian dengan Rio. Ia baru memutuskan untuk pulang ketika atasannya pulang.

Bekerja sesudah jam kantor adalah momen yang masih sangat diingati Rio

sampai kini. “Pertama kali berkenalan dengan Pak Agus adalah ketika sekebalinya dari rapat, Pak Agus bertanya pada sekretarisnya apakah masih ada orang di kantor, karena ada satu dokumen yang perlu dikerjakan segera. Sekretaris menyebut, ada Pak namanya Rio, dan *I tell you a secret*, seketika saya merasa beruntung pernah mengikuti kursus mengetik sepuluh jari waktu SMA, hahaha,” selorohnya. Rio pun diminta untuk menyelesaikan dokumen tersebut, dan berkat kemampuan mengetiknya ia dapat menyelesaikannya dengan cepat.

Sejak saat itu, atasannya selalu mencarinya ketika ada dokumen yang perlu segera diselesaikan. Meski bergelar master dari AS, baginya tak ada alasan untuk mengecilkkan pekerjaan mengetik. Bahkan dari pekerjaan mengetiklah Rio, sang pelaksana, mulai dikenal secara personal oleh Agus yang merupakan pejabat Eselon II pada saat itu. Rio pun kemudian diberi kepercayaan untuk mengerjakan

tugas-tugas lainnya yang membuka jalan karirnya. “*Picture this*, waktu beliau duduk di sebelah saya, mendiktekan surat atau nota dinas untuk saya ketik, saya memberanikan diri untuk memberikan pandangan terhadap perbaikan yang perlu dilakukan, kita berinteraksi. Itu adalah momen dimana pimpinan mengenal kemampuan kita, dan itu tumbuh menjadi kepercayaan.” ungkap Rio.

Bagi Rio, “*Small thing may change your life.*” Belajarlah menikmati hal-hal kecil yang tersebar dimana-mana. Dirinya berhasil membuktikan bahwa hal yang dianggap kecil sebenarnya membawa pengaruh besar bagi kehidupannya.

BELAJAR LEBIH DARI SEKEDAR HUKUM

Pada tahun 1993, pemerintah melaksanakan program bernama privatisasi. Saat itu, BUMN masih di bawah Kementerian Keuangan dan Menteri Keuangan Mar’ie Muhammad,



FOTO : SENO ADI NUGROHO

menginginkan perusahaan Indonesia bisa terdaftar di bursa dunia seperti di *New York Stock Exchange* atau *London Stock Exchange*. Ia pun kemudian membentuk tim yang berjumlah tujuh orang, salah satunya adalah Agus Haryanto, atasan Rio saat di Biro Hukum.

“7 orang anggotanya, terdiri dari 6 orang Eselon I dan 1 orang Eselon II sebagai anggota merangkap Sekretaris Tim. Pak Mar’ie dan Pak Jusuf Anwar menugaskan Pak Agus Haryanto sebagai sekretaris tim dimana beliau mengajak saya untuk ikut terlibat di tim tersebut. Meskipun keterlibatan di program tersebut hanya sebagai tugas tambahan bagi saya yang merupakan pelaksana di Biro Hukum, tapi saya merasa tugas itu penting dan merupakan kesempatan yang mungkin tidak datang kedua kalinya, Saya membantu Pak Agus menjalankan Tim Privatisasi tersebut,” Rio mengisahkan.

Privatisasi pertama yaitu Indosat, berjalan sukses, dan keterlibatan Rio juga dinilai positif. Ia masih ingat bahwa program privatisasi berjalan dengan baik. Indonesia bisa meng-go public-kan BUMNnya.

Indosat tahun 1994, TELKOM tahun 1995, BNI tahun 1996, Antam dan Timah tahun 1997 dan berhenti ketika krisis moneter/krisis keuangan asia 1998 menghantam.

Rio menambahkan, “Paling mengagetkan adalah IPO Bank BNI. *Oversubscribed*-nya lebih 20 kali, luar biasa. *Anyway*, kalau saya lihat ke belakang, *lessons learned*-nya adalah mulai dari yang kecil (mengetik), dikenal (karena berinteraksi), mendapat kepercayaan (di dalam penugasan), dan terus berkomitmen membuat saya jadi kenal dan dikenal Jusuf Anwar, Martiono, Marzuki Usman, Bacelius Ruru, Bambang Subianto dan Fuad Bawazier.”

Tidak lama berselang, Rio pun dipromosikan pada jabatan struktural pertamanya sebagai Kepala Subbagian di Biro Hukum, Sekretariat Jenderal. Tiga tahun menjabat Eselon IV, Rio dipromosikan ke jabatan Eselon III sebagai Kepala Subdirektorat Privatisasi Direktorat Jenderal BUMN dimana Bacelius Ruru menjabat sebagai Dirjen. Rio mengisahkan. “Saya lapor Pak Agus Haryanto. Beliau bilang, berat melepas,

tapi karena promosi beliau mengizinkan (pindah ke Ditjen BUMN-red)”. Tanpa disangka, di tahun 1998 terjadi krisis Asia yang juga berimbas pada kejatuhan ekonomi Indonesia. Presiden Habibie mengangkat Bambang Subianto menjadi Menteri Keuangan. “Karena status Direktorat Jenderal BUMN menjadi Kementerian BUMN, Rio memutuskan untuk tetap di Departemen Keuangan dan menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum,” ungkapnya.

Sempat terlibat dalam pembentukan BPPN, akhirnya pada masa Menteri Keuangan berikutnya, Bambang Sudibyo, Rio ditugaskan di BPPN sebagai Senior Vice President untuk Aset Manajemen Investasi di BPPN selama 2,5 tahun. Berangkat bekerja sebagai sarjana hukum, “*I learn a lot different things other than masalah hukum,*” kenangnya.

PEMBELAJARAN TERBAIK ADALAH DARI PEKERJAAN!

Sekembali dari BPPN, Rio diposisikan sebagai staf di kantor Staf Ahli Menteri Keuangan, tidak lama kemudian dia diangkat sebagai Kepala Bagian TU Pimpinan. Pada saat itu, Jabatan Menteri Keuangan diduduki oleh Boediono. Secara berseloroh Rio berkata, “Pada masa itu Kepala Bagian TUPIM saya bikin seperti Pushaka kecil. Di masa itu saya bekerja untuk Pak Boediono.”

Selepas Boediono tidak menjadi Menteri Keuangan, Rio mendapat tawaran dari Agus Haryanto yang telah menjadi Sekretaris Jenderal untuk menjadi *Senior Advisor* pada Bank Dunia yang berkedudukan di Amerika Serikat. Rio mengambil kesempatan tersebut dan menjabat pada rentang tahun 2004 sampai 2006. Setelah itu, dirinya kembali ke Indonesia dan menjadi Kepala Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal (PPRF). “Pak Anggito Abimanyu menyuruh saya, beliau bilang sudah bicara dengan Ibu Sri Mulyani Indrawati. Terus terang, saya belum tahu apa itu PPRF (Pusat Penjaminan dan Risiko Fiskal) dan apa kehendak Pak Anggito dan Ibu Sri Mulyani Indrawati terhadap PPRF. Karena PPRF baru pertama kali dibentuk, dapat dikatakan saya mencoba membentuk Pusat tersebut. Tidak ada yang punya pengalaman. Sebagai pimpinan pertama, dengan anggaran yang ada, prioritas pertama saya adalah bagaimana mendidik anak-anak buah saya, yang kesemuanya merupakan orang-orang baru. Saya berikan kesempatan mereka untuk *training* di dalam dan luar negeri. Saya yakin, hal yang saya lakukan merupakan investasi bagi PPRF di masa mendatang,” ungkap Rio.

Terhadap pembentukan PPRF, yang kemudian sekarang menjelma menjadi 2 (dua) direktorat di Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan

dan Risiko, Direktorat KPBU dan Direktorat Penjaminan, Rio kagum akan visi Menkeu saat itu Sri Mulyani Indrawati, “Terus terang, Rio tidak menyangka bahwa *demand* ekonomi nasional terhadap PPP (*Public Private Partnership*) akan seperti sekarang. “Coba anda bayangkan, bahkan ketika PPP belum ramai, kita sudah menyiapkan diri sejak 2006. Saat ini kita adalah salah satu *emerging economies* yang dianggap paling maju di dalam PPP, karena Pemerintah kita dianggap telah memiliki *tools* yang *fair* bagi investasi di PPP,” tambah Rio.

Rio memimpin PPRF selama 2 tahun. Kemudian setelah itu dirinya ditugaskan untuk menjadi Kepala Pushaka. Pada tahun 2010, Ibu Sri Mulyani memilih karir profesional menjadi salah satu *Executive Vice President* di *World Bank*. Agus Martowardojo yang menjadi pengganti Menteri Keuangan meminta Rio untuk tetap menjadi Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan (Pushaka) hingga tahun 2012.

Di era Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Rio dipromosikan menjadi Pejabat Eselon I sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi. Kemudian Rio kembali ke Bank Dunia pada 2014-2016 sebagai *Executive Director*. Pada periode keduanya di Bank Dunia, ia berhasil menjadikan Menteri Keuangan Indonesia sebagai Ketua *Development Committee*. Selain itu, Ia juga berhasil membuat Indonesia terpilih menjadi tuan rumah *Annual Meeting IMF- World Bank 2018*. Rio bercerita, pada umumnya suatu negara dapat menjadi pemimpin sidang paling banyak dua tahun berturut-turut, sedangkan pada masa ini Indonesia berhasil menjadi pemimpin sidang selama tiga tahun berturut-turut.

“Sebetulnya saya sudah mendapatkan mandat dari negara konstituen untuk tetap menjadi *Executive Director* pada periode 2016-2018, namun Ibu Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan yang baru memutuskan agar saya kembali dan bertukar tempat dengan Pak Andin Hadiyanto sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional”, Rio berkisah tentang kepulangannya ke Indonesia.

Rio menegaskan, perjalanan kariernya yang panjang, beragam, dan penuh warna tersebut dianggap hanyalah bagian dari sebuah proses pembelajaran hidup. Dirinya meyakini lewat pekerjaan itulah seseorang bisa mendapat ilmu tentang kehidupan yang tidak didapat di bangku sekolah. “Lewat pekerjaan kita bisa mengambil pelajaran bahwa hidup itu penuh



dengan perbedaan, hidup itu kaya, dan yang paling penting adalah kita belajar bagaimana untuk mampu memandang sesuatu atau seseorang secara lebih objektif, tidak hanya dari kacamata kita sendiri, jadi saya merasa pembelajaran terbaik adalah dari pekerjaan saya tersebut,” ucap Rio.

BPPK IS OUR "HOME"

Pada saat diberikan kepercayaan menjadi Kepala BPPK, Rio merasa sangat bersemangat meski bidang ini adalah bidang yang baru baginya. Bisa dibalang sejak awal posisi Rio adalah sebagai "nasabah" atau "klien" BPPK, namun kini ia sangat bersyukur dapat memimpin BPPK yang didominasi oleh anak-anak muda. "Tantangan saya adalah, bagaimana mengelola aset-aset BPPK, seperti PKN STAN, pusdiklat-pusdiklat, dan bala-balai, menjadi kekuatan BPPK. Tujuan utamanya adalah meningkatkan standar kualitas untuk *stand out* di era digital, dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki," pandang Rio.

Di awal kepemimpinannya, Rio menyampaikan bahwa ada beberapa ide dan gagasan untuk diimplementasikan di BPPK guna mencapai tujuan dimaksud, namun ide tersebut masih dan akan terus didiskusikan bersama jajaran pimpinan di BPPK. Berbicara tentang Kemenkeu *Corporate University* dirinya sebagai Kepala Badan siap untuk melanjutkan apa yang telah dicapai pimpinan sebelumnya, dan menjamin hal tersebut akan terus menjadi prioritas pembahasan di level *top management* Kementerian Keuangan.

Pada pidatonya di acara pisah sambut dengan Kepala BPPK sebelumnya, ayah dari satu orang putri ini menyampaikan harapannya terhadap BPPK lewat analogi kata "*house*" dan "*home*". Meski sama-sama bermakna 'rumah' jika diartikan ke Bahasa Indonesia, dalam terminologi Bahasa Inggris "*house*" diasosiasikan sebagai sekedar sebuah bangunan dan simbol, sedangkan "*home*" diartikan sebagai tempat tinggal dimana keluarga berada, tempat berbagi suka dan duka, tempat berkarya, yang dicintai dan dibela sepenuh hati. "Saya berharap selama memimpin instansi ini, dapat merangkul lebih banyak lagi orang yang menganggap BPPK ini sebagai '*home*' bukan hanya sebagai "*house*", agar bisa dijaga, diperjuangkan, dan dikembangkan bersama-sama," tutupnya.



Serambi Ilmu

Mohamad Jafar

NILAI PABEAN UNTUK
BARANG PENUMPANG
DAN AWAK SARANA
PENGANGKUT

Setyawan Dwi Antoro

JURNAL TRANSAKSI
UANG PERSEDIAAN
ANTARA APLIKASI SAIBA
DAN APLIKASI SAKTI

R. Eha Salhah

KLASIFIKASI
HARMONIZED SYSTEM
JENIS BARANG:
ANTIBIOTIK BAHAN
BAKU OBAT

MOHAMAD JAFAR
WIDYAISWARA PUSDIKLAT BEA DAN CUKAI

NILAI PABEAN UNTUK BARANG PENUMPANG DAN AWAK SARANA PENGANGKUT

ABSTRAK

Setiap barang yang diimpor untuk dipakai merupakan obyek dikenakan bea masuk. Dalam hal bea masuk dikenakan berdasarkan tarif *advalorem* (persentase), nilai yang digunakan sebagai dasar untuk penghitungan bea masuk adalah nilai pabean. Barang Pribadi Penumpang adalah sebagian dari barang impor yang mendapat perlakuan khusus dalam proses pemeriksaan dan penetapan bea masuknya yaitu menggunakan mekanisme *official assessment*. Dalam hal nilai barang tidak melebihi nilai pabean dalam jumlah tertentu maka bea masuk diberikan pembebasan. Dalam PMK-160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk, ditetapkan bahwa nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah dalam terminologi CIF. Sudah tepatkah ketentuan nilai pabean untuk penghitungan atas Barang Pribadi Penumpang yang saat ini berlaku?

Kata kunci : nilai pabean, barang penumpang, *Free on Board (FOB)*, *Cost Insurance Freight (CIF)*.

Barang impor adalah barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean. Berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang No 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Undang-undang Kepabeanan), atas barang yang diimpor terutang bea masuk. Selanjutnya pada pasal 10B Undang-undang Kepabeanan disebutkan bahwa barang yang diimpor untuk dipakai dapat dikeluarkan setelah diberitahukan dan dibayar bea masuknya. Impor untuk dipakai adalah impor yang dimaksudkan untuk dipakai, dikuasai atau dimiliki, berbeda dengan impor sementara dimana barang yang diimpor tidak dimiliki oleh importirnya namun hanya diimpor

sementara waktu selanjutnya diekspor kembali.

Pada tataran praktis, ruang lingkup barang yang diimpor untuk dipakai sangatlah luas. Bahan baku dan bahan penolong industri yang diimpor dalam jumlah yang relatif banyak pada umumnya merupakan impor dipakai. Berbagai jenis makanan, minuman dan barang-barang konsumtif yang diimpor menggunakan petikemas di pelabuhan dapat dipastikan merupakan impor dipakai. Impor dipakai untuk kategori barang-barang tersebut diberitahukan importir menggunakan Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Dalam tata cara penyelesaian impor dipakai menggunakan PIB ini berlaku

prinsip *self assessment* dimana importir secara mandiri memberitahukan ke kantor pabean untuk diperiksa dan ditetapkan kebenarannya.

Selain impor dipakai menggunakan PIB, terdapat jenis impor dipakai yang lainnya yaitu impor yang dilakukan oleh penumpang dan awak sarana pengangkut (kru penerbangan atau pelayaran) dengan menggunakan *Customs Declaration (CD)*. Barang yang diimpor oleh penumpang dan awak sarana pengangkut dapat terbagi dua kategori, yaitu :

1. barang pribadi, tidak diperlakukan sebagai barang dagangan dan mendapat perlakuan khusus di bidang kepabeanan,

2. bukan barang pribadi, diperlakukan sebagai barang dagangan dan tidak mendapat perlakuan khusus di bidang kepabeanan.

Ketentuan tentang impor oleh penumpang ini datur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut. Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang perlakuan khusus, diantaranya adalah diberikannya pembebasan bea masuk sampai dengan nilai pabean tertentu, yaitu untuk barang pribadi penumpang sepanjang tidak lebih dari FOB USD 500 per orang per kedatangan, sedangkan untuk awak sarana pengangkut diberikan pembebasan sepanjang barang pribadi tidak lebih dari FOB USD 50 per kedatangan.

Selain nilai pabean, perlakuan khusus untuk impor barang pribadi penumpang dan awak sarana pengangkut juga berkaitan dengan pengenaan tarif untuk perhitungan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Tarif bea masuk oleh Peraturan dimaksud ditetapkan sebesar 10% untuk seluruh barang pribadi yang diimpor.

PENENTUAN NILAI PABEAN

Pada artikel kali ini fokus pembahasan kita adalah tentang terminologi nilai pabean barang penumpang. Pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 203/PMK.04/2017 nilai pabean barang penumpang menggunakan terminologi FOB (*Free on Board*). Istilah nilai pabean dalam FOB ini dapat menimbulkan kerancuan pada pelaksanaan tugas di lapangan, karena terdapat ketentuan tentang nilai pabean sebagaimana diatur pada pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk dimana nilai pabean untuk penghitungan bea masuk pada prinsipnya menggunakan terminologi CIF (*Cost, Insurance, dan Freight*).

FOB berarti harga barang yang disepakati saat barang diserahkan penjual diatas alat angkut diluar daerah pabean, sedangkan CIF berarti harga barang yang disepakati saat barang diserahkan penjual diatas alat angkut di pelabuhan daerah pabean dalam kondisi asuransi telah dibayar oleh penjual. Dengan demikian tentu harga barang dalam terminologi FOB lebih rendah dibandingkan dengan CIF karena unsur biaya CIF lebih banyak meliputi biaya angkutan dan asuransi.

Penentuan terminologi apa yang akan digunakan dalam penghitungan bea masuk barang penumpang dan awak sarana pengangkut berpengaruh secara nyata pada keputusan pejabat dalam memungut bea masuk dan besarnya pungutan yang harus dibayar oleh penumpang atau awak sarana pengangkut.

DALAM HAL DIGUNAKAN TERMINOLOGI CIF

Barang impor dinilai FOB nya untuk memutuskan dikenakan atau tidaknya bea masuk sesuai dengan batasan pembebasan (FOB USD 500 atau FOB USD 50), selanjutnya nilai pabean untuk menghitung bea masuk adalah dari FOB

kelebihan pembebasannya ditambah dengan biaya angkut (*freight*) dan biaya asuransi sehingga didapat nilai CIF.

Sebagai contoh: Seorang penumpang pesawat bernama Slamet baru tiba di bandara Juanda Surabaya dari Tokyo Jepang, membawa kamera digital baru merk Sony. Pejabat menetapkan harga barang sebesar FOB USD 600,- Maka nilai pabean sebagai dasar untuk menghitung bea masuk adalah $(600-500) = 100,-$ ditambah dengan biaya *freight* dan biaya asuransi.

DALAM HAL DIGUNAKAN TERMINOLOGI FOB

Barang impor dinilai FOBnya untuk memutuskan dikenakan atau tidaknya bea masuk sesuai dengan batasan pembebasan, selanjutnya nilai pabean untuk menghitung bea masuk cukup didapat dari FOB kelebihan pembebasannya. Kembali pada contoh paragraf sebelumnya, Pejabat menetapkan harga barang sebesar FOB USD 600,- Maka nilai pabean sebagai dasar untuk menghitung bea masuk adalah $(600-500) = 100,-$ Nilai FOB USD 100 dikalikan dengan kurs merupakan nilai pabean barang penumpang untuk



FOTO : BLOG.OXFORDDICTIONARIES.COM

menghitung bea masuk tanpa ditambah dengan biaya *freight* dan biaya asuransi.

Dari dua cara penentuan nilai pabean diatas, manakah yang lebih tepat ditinjau dari prinsip kepabeanaan yang berlaku? Menurut pendapat penulis, nilai pabean untuk menghitung bea masuk atas barang penumpang lebih tepat jika menggunakan terminologi FOB. Mengapa demikian? Terdapat dua alasan atas pendapat ini dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Pertama, prinsip nilai pabean untuk penghitungan bea masuk sesuai dengan pasal 15 Undang-undang Kepabeanaan adalah nilai transaksi atas barang yang diimpor.

Kedua, secara riil barang pribadi yang dibawa penumpang tidak ada unsur biaya pengangkutan (*freight*) dimana biaya pengangkutan barang telah menjadi satu kesatuan dengan biaya tiket perjalanan penumpang bersangkutan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, nilai pabean untuk barang pribadi penumpang dan awak sarana pengangkut lebih tepat menggunakan terminologi FOB. Penegasan pada Peraturan Menteri tentang nilai pabean untuk barang pribadi penumpang dan awak sarana pengangkut menggunakan terminologi FOB penting dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan landasan teknis pegawai yang menangani barang pribadi penumpang dan awak sarana pengangkut.

DATABASE NILAI PABEAN

Guna mendukung pelaksanaan tugas dalam penetapan nilai pabean, disusunlah Data Base Nilai Pabean (DBNP). DBNP terdiri dari dua yaitu DBNP I dan DBNP II. DBNP I dibuat oleh Kantor Pusat dan berlaku secara nasional, sedangkan DBNP II dibuat oleh Kantor Wilayah atau KPU Bea dan Cukai dan hanya berlaku untuk wilayah kerja Kantor Wilayah atau KPU bersangkutan. Ketentuan yang mengatur tentang DBNP ini adalah Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-19/BC/2016 tentang Database Nilai Pabean.

Pada pasal 1 ayat (1) P-19/BC/2016 dijelaskan definisi Database Nilai Pabean, yaitu kumpulan data nilai barang impor dalam Cost, Insurance, dan Freight (CIF) dan/atau nilai barang impor yang telah dilakukan penghitungan kembali, yang tersedia di Daerah Pabean. Selanjutnya pada pasal 6 ayat 1 (b) disebutkan bahwa fungsi dari DBNP I adalah sebagai salah satu data untuk penentuan dan penetapan nilai pabean secara *official assessment*.

Berkaitan dengan hal tersebut, timbul potensi permasalahan ketika DBNP dalam terminologi CIF sedangkan nilai pabean untuk pembebasan menggunakan terminologi FOB. Sebagai contoh ada seorang penumpang membawa jam tangan baru dalam kemasan khusus merek SOLEX, tidak ada informasi harga barang dari penumpang karena faktur pembelian tidak dilampirkan. Dalam DBNP I terdapat barang identik jam bersangkutan dengan harga CIF USD 1.000,- Sesuai ketentuan barang pribadi penumpang yang nilai pabeannya tidak melebihi FOB USD 500,- mendapatkan pembebasan bea masuk.

Dari contoh diatas terlihat ada kendala penerapan DBNP I untuk penetapan barang penumpang karena terdapat perbedaan terminologi penyerahan barang, dimana barang dalam kondisi CIF tentu lebih mahal dibandingkan dengan FOB. Untuk penyelarasan kondisi ini, ada dua alternatif penyelesaian, yaitu pertama nilai pabean untuk barang penumpang menggunakan CIF sebagaimana data harga yang terdapat pada DBNP I, kedua data harga pada DBNP I diurai tidak hanya CIF namun juga dalam bentuk FOB.

Alternatif solusi pertama paling mudah dilaksanakan namun kurang sesuai dengan konsep barang penumpang karena riilnya tidak terdapat unsur biaya pengangkutan (*freight*) pada barang penumpang dimana penumpang hanya dikenakan biaya perjalanan. Solusi kedua lebih sulit dilaksanakan karena untuk mengurai nilai pabean dari CIF menjadi FOB tentu membutuhkan sumber daya dan waktu yang tidak sedikit. Sebaiknya Ditjen Bea dan Cukai memiliki DBNP khusus untuk penyelesaian barang penumpang dalam kondisi FOB dan

diberlakukan secara nasional sehingga penyelesaian barang penumpang lebih cepat dan akurat.

SIMPULAN

Penyederhanaan tata cara pengenaan bea masuk barang pribadi penumpang dan awak sarana pengangkut telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 untuk mempercepat arus orang yang masuk daerah pabean. Penyederhaan pengenaan bea masuk barang pribadi penumpang dan awak sarana pengangkut akan semakin lengkap jika pada peraturan tersebut ditegaskan terminologi nilai pabean menggunakan FOB. Penegasan penggunaan terminologi FOB selain sesuai dengan prinsip nilai pabean yang diatur di Undang-undang Kepabeanaan juga untuk mencegah adanya perbedaan penafsiran pejabat di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-undang No 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang No 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 Tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2018
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut
- Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-19/BC/2016 tentang Database Nilai Pabean

JURNAL TRANSAKSI UANG PERSEDIAAN ANTARA APLIKASI SAIBA DAN APLIKASI SAKTI

ABSTRAK

Laporan keuangan pemerintah dihasilkan dari pencatatan (jurnal) atas transaksi keuangan yang dilakukan pemerintah. Transaksi yang sering terjadi adalah transaksi uang persediaan atau UP yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran, mulai dari penyediaan UP hingga penyetoran kembali ke kas negara. Penyusunan laporan keuangan pemerintah saat ini menggunakan aplikasi SAIBA. Aplikasi SAIBA ini bersifat sementara, sebelum diberlakukannya aplikasi SAKTI. Tulisan ini mengulas perbedaan jurnal transaksi UP antara aplikasi SAIBA dan aplikasi SAKTI, serta dampaknya terhadap pelaporan keuangan interim pemerintah.

Kata kunci: uang persediaan, jurnal transaksi, SAIBA, SAKTI.

PENDAHULUAN

Laporan keuangan yang disusun pemerintah berasal dari input berupa transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk Kementerian/Lembaga. Secara garis besar transaksi-transaksi pemerintah tersebut dapat dikelompokkan menjadi transaksi saldo awal, transaksi anggaran, transaksi realisasi anggaran, transaksi pengesahan, transaksi penyesuaian, dan transaksi lainnya. Transaksi realisasi anggaran pada Kementerian/Lembaga terbagi menjadi dua, yaitu realisasi pendapatan dan realisasi belanja.

Dalam mekanisme pelaksanaan pembayaran belanja atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dikenal istilah pembayaran langsung (LS) dan pembayaran dengan Uang Persediaan (UP). Pembayaran langsung (LS) berarti pembayaran dilakukan secara langsung oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (Kuasa BUN) dari rekening Kas Umum Negara (KUN) kepada pihak yang berhak menerima pembayaran (*supplier*).

Sementara itu, pembayaran dengan UP dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran di setiap satker pengelola APBN. Uang Persediaan (UP) ini merupakan uang muka atau persekot yang diterima oleh Bendahara Pengeluaran dari KPPN selaku Kuasa BUN untuk keperluan pembayaran belanja operasional satker yang jumlahnya relatif kecil. UP ini sifatnya seperti kas kecil (*petty cash*) di dunia bisnis komersial (perusahaan). Tentu saja penggunaan UP oleh Bendahara Pengeluaran ini harus dipertanggungjawabkan kembali kepada KPPN.

Hingga saat ini, dalam rangka penyusunan laporan keuangan berbasis akrual, aplikasi yang digunakan oleh Kementerian/Lembaga untuk mencatat transaksi keuangan, termasuk transaksi UP oleh Bendahara Pengeluaran, adalah aplikasi SAIBA atau Sistem Aplikasi Akuntansi Instansi Berbasis Akrual. Aplikasi SAIBA ini merupakan aplikasi yang bersifat sementara sebelum aplikasi SAKTI atau Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi selesai dibangun dan dikembangkan. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat.

Sebagai aplikasi yang dibangun untuk kebutuhan sementara (nonpermanen), aplikasi SAIBA banyak dikeluhkan *user/operator* di satker Kementerian/Lembaga. Mulai dari seringnya dilakukan *update* versi aplikasi (saat ini SAIBA versi 5.1), kurang terintegrasi dengan aplikasi pengelolaan keuangan satker yang lain (*database* tidak terintegrasi), dan masih menggunakan cara kirim/terima ADK sehingga sering terjadi data *mismatch* antara aplikasi SAIBA dengan aplikasi lainnya. Di luar keluhan-keluhan tersebut, kekurangan mendasar dari Aplikasi SAIBA adalah pencatatan transaksi, khususnya realisasi belanja, yang masih mendasarkan pada terbitnya SP2D. Hal ini berakibat pada laporan keuangan interim yang dihasilkan tidak dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai posisi keuangan satker.

Tahun ini (2018) sebagian besar satker di lingkungan Kementerian Keuangan telah menggunakan aplikasi SAKTI sebagai

piloting project. Aplikasi SAKTI dirancang dengan mengintegrasikan beberapa aplikasi pengelolaan keuangan yang selama ini digunakan oleh satker. Aplikasi SAKTI terdiri dari 8 modul, yaitu Modul Anggaran, Modul Komitmen, Modul Pembayaran, Modul Aset Tetap, Modul Persediaan, Modul Bendahara, Modul Pelaporan, dan Modul Admin. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, setelah selesai diujicobakan, aplikasi SAKTI ini akan di-launch dan digunakan secara serentak di seluruh satker Kementerian/Lembaga.

Menyongsong pemberlakuan aplikasi SAKTI tersebut, penulis tertarik untuk membandingkan jurnal transaksi antara aplikasi SAIBA yang *existing* digunakan saat ini dengan aplikasi SAKTI yang akan digunakan mendatang. Dengan hal tersebut, pembaca dapat melihat kelebihan aplikasi SAKTI daripada aplikasi SAIBA. Penulis membatasi pembahasan tulisan ini pada transaksi-transaksi keuangan terkait uang persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran, mulai dari penerimaan UP hingga pertanggungjawaban dan penyetorannya kembali ke Kas Negara.

BENDAHARA PENGELUARAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang dimaksud dengan Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk

untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Negara dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada kantor/satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa terdapat 5 (lima) tugas pokok Bendahara Pengeluaran terkait dengan uang APBN, yaitu:

1. menerima;
2. menyimpan;
3. membayarkan;
4. menatausahakan; dan
5. mempertanggungjawabkan.

Uang APBN yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran meliputi Uang Persediaan (UP); uang dari SPM/SP2D-LS Bendahara, uang dari pungutan/potongan pajak; uang yang menjadi hak negara seperti PNPB, dan uang lainnya seperti uang titipan (*dropping*) dari pihak lain. Dari kelima sumber atau jenis uang tersebut, pada dasarnya UP-lah yang menjadi tugas utama yang harus dikelola oleh Bendahara Pengeluaran. Hal ini didasarkan pada alasan pengangkatan/penunjukan seorang Bendahara Pengeluaran adalah untuk mengelola UP di satkernya masing-masing.

TRANSAKSI UANG PERSEDIAAN

Uang Persediaan (UP) adalah adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS). Jenis belanja dalam DIPA yang dapat dibayar dengan UP adalah Belanja Barang (52), Belanja Modal (53), dan Belanja Lain-lain (58). Dalam saat tertentu, terdapat dispensasi penggunaan UP untuk pembayaran belanja di luar ketiga jenis belanja tersebut. Misalnya saat menjelang akhir tahun anggaran, dapat digunakan untuk membayar uang makan PNS yang tergolong sebagai Belanja Pegawai (51).

Besaran UP yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran berbeda untuk masing-masing satker. Acuan dasarnya adalah besaran pagu anggaran untuk jenis belanja yang dapat dibayar dengan UP. Secara rinci, UP dapat diberikan kepada Bendahara Pengeluaran satker sebanyak-banyaknya sebesar:

1. Rp50 juta untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP sampai dengan Rp900 juta;

2. Rp100 juta untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP di atas Rp900 juta sampai dengan Rp2,4 Milyar;
3. Rp200 juta untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP di atas Rp2,4 Milyar sampai dengan Rp6 Milyar; dan
4. Rp500 juta untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP di atas Rp6 Milyar.

Dalam kondisi tertentu, jumlah tersebut dapat dilampaui dengan persetujuan dari Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan setempat. Pertimbangan yang digunakan adalah frekuensi penggantian UP tahun sebelumnya lebih dari rata-rata satu kali dalam satu bulan selama satu tahun anggaran dan perhitungan kebutuhan penggunaan UP dalam satu bulan melampaui besaran UP di atas.

UP yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran bersifat *revolving* (daur ulang). Artinya jika UP telah digunakan untuk belanja, dapat dimintakan ke KPPN untuk diisi kembali. Ketentuan saat ini mengatur penggantian atau pengisian kembali UP dapat dilakukan setelah UP digunakan sekurang-kurangnya 50% dari jumlah UP yang ditetapkan. Begitu seterusnya hingga pagu belanja telah habis digunakan atau telah sampai di akhir tahun anggaran. Pembayaran belanja dengan UP dapat dilakukan maksimal sebesar Rp50 juta per bukti transaksi. Permintaan penggantian kembali tersebut sekaligus merupakan pertanggungjawaban UP yang telah digunakan sebelumnya. Pada akhir tahun anggaran, penggantian atau pertanggungjawaban UP bersifat nihil, artinya tidak ada penggantian UP yang telah digunakan. Selanjutnya, sisa UP yang masih ada di tangan Bendahara Pengeluaran harus disetorkan kembali ke rekening Kas Umum Negara.

Dengan demikian, transaksi keuangan yang berkaitan dengan UP di satker meliputi:

1. penyediaan UP;
2. penggunaan UP;
3. penggantian UP (GUP);

4. penggantian UP Nihil (GUP Nihil); dan
5. penyetoran kembali sisa UP ke Kas Negara.

Dokumen sumber sebagai bukti transaksi penyediaan UP adalah SPM & SP2D-UP yang biasanya terbit di awal tahun anggaran. Penggunaan UP dibuktikan dengan dokumen transaksi berupa Surat Perintah Bayar (SPBy) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang disertai dengan kuitansi pembayaran, nota pembelian, BAST, maupun dokumen terkait lainnya. Penggantian/pertanggungjawaban UP ditandai dengan terbitnya SPM & SP2D-GUP. Penggantian/pertanggungjawaban UP nihil dibuktikan dengan terbitnya SPM & SP2D-GUP Nihil. Terakhir, penyetoran kembali sisa UP ke Kas Negara menggunakan dokumen berupa Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) ataupun dengan Bukti Penerimaan Negara (BPN).

JURNAL TRANSAKSI UANG PERSEDIaan

Pembahasan jurnal transaksi UP yang dilakukan Bendahara Pengeluaran diuraikan untuk setiap jenis transaksi mulai dari penyediaan UP hingga penyetoran kembali sisa UP ke Kas Negara. Setiap jurnal transaksi disajikan langsung secara komparatif berdasarkan aplikasi SAIBA dan aplikasi SAKTI.

1. Transaksi Penyediaan UP

Misalnya tanggal 9 Januari dibuat SPP-UP senilai Rp50.000.000 dan SPM-UP terbit di hari yang sama. SP2D-UP dari KPPN terbit tanggal 10 Januari.

Jurnal SAIBA:

Tanggal	Deskripsi	Debit	Kredit
9 Jan	Tidak ada jurnal		
	<i>Belum dicatat karena baru terbit SPP, SP2D belum terbit</i>		
10 Jan	Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp50.000.000,-	
	Uang Muka dari KPPN		Rp50.000.000,-
	Mencatat terbitnya SP2D-UP senilai Rp50.000.000.		

Jurnal SAKTI:

Tanggal	Deskripsi	Debit	Kredit
9 Jan	Piutang dari UP yang akan Diterima	Rp50.000.000,-	
	Pengeluaran Transito yang Masih Harus Dibayar		Rp50.000.000,-
	Mencatat terbitnya SPP-UP senilai Rp50.000.000.		
10 Jan	Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp50.000.000,-	
	Piutang dari UP yang akan Diterima		Rp50.000.000,-
	Pengeluaran Transito yang Masih Harus Dibayar	Rp50.000.000,-	
	Uang Muka dari KPPN		Rp50.000.000,-
	Mencatat terbitnya SP2D-UP senilai Rp50.000.000.		

2. Transaksi Penggunaan UP

Misalnya tanggal 15 Januari ada kuitansi honor narasumber seminar Rp10.000.000 dan tanggal 20 Januari ada kuitansi pembelian Peralatan & Mesin (aset tetap intrakomptabel) Rp20.000.000.

Jurnal SAIBA: tidak ada jurnal, karena SP2D belum terbit.

Jurnal SAKTI:

Tanggal	Deskripsi	Debit	Kredit
15 Jan	Tidak ada jurnal		
	Kuitansi honor narasumber seminar merupakan belanja non-persediaan dan non-aset tetap/lainnya intrakomptabel sehingga belum membentuk jurnal.		
20 Jan	Peralatan & Mesin yang Belum Diregister	Rp20.000.000	
	Utang yang Belum Diterima Tagihannya		Rp20.000.000
	Mencatat kuitansi pembelian Peralatan & Mesin senilai Rp20.000.000.		

3. Transaksi Penggantian UP (GUP)

Tanggal 30 Januari dibuat SPP-GUP untuk belanja honor narasumber seminar Rp10.000.000 dan pembelian Peralatan & Mesin Rp20.000.000. SPM-GUP terbit di hari yang sama. SP2D-GUP terbit tanggal 31 Januari.

Jurnal SAIBA:

Tanggal	Deskripsi	Debit	Kredit
30 Jan	Tidak ada jurnal		
	<i>Belum dicatat karena SP2D belum terbit.</i>		
31 Jan	Belanja Jasa Profesi	Rp10.000.000	
	Belanja Modal Peralatan & Mesin	20.000.000	
	Piutang dari KUN		Rp30.000.000
	<i>Mencatat jurnal kas atas terbitnya SP2D-GUP.</i>		
31 Jan	Beban Jasa Profesi	Rp10.000.000	
	Peralatan & Mesin yang Belum Diregister	20.000.000	
	Ditagihkan ke Entitas Lain		Rp30.000.000
	<i>Mencatat jurnal akrual atas terbitnya SP2D-GUP.</i>		

Jurnal SAKTI:

Tanggal	Deskripsi	Debit	Kredit
30 Jan	Beban Jasa Profesi	Rp10.000.000	
	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar		Rp10.000.000
30 Jan	Utang yang Belum Diterima Tagihannya	Rp20.000.000	
	Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar		Rp20.000.000
	<i>Mencatat jurnal akrual atas terbitnya SPP-GUP.</i>		
31 Jan	Belanja Jasa Profesi	Rp10.000.000	
	Belanja Modal Peralatan & Mesin	20.000.000	
	Ditagihkan ke Entitas Lainnya		Rp30.000.000
	<i>Mencatat jurnal kas atas terbitnya SP2D-GUP.</i>		

31 Jan	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	Rp10.000.000	
	Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	20.000.000	
	Ditagihkan ke Entitas Lain		Rp30.000.000
	Mencatat jurnal akrual atas terbitnya SP2D-GUP.		

4. Transaksi Penggantian UP Nihil (GUP Nihil)

Saat GUP Nihil, jurnal transaksi sama dengan GUP, hanya saja ada tambahan jurnal karena tidak ada penggantian UP. Misal tanggal 20 Desember, terbit SPP/SPM/SP2D GUP Nihil sebesar Rp40.000.000. Selain jurnal pada transaksi GUP, terdapat jurnal tambahan sebagai berikut:

Jurnal SAIBA:

Tanggal	Deskripsi	Debit	Kredit
20 Des	Uang Muka dari KPPN	Rp40.000.000	
	Kas di Bendahara Pengeluaran		Rp40.000.000
	Mencatat jurnal akrual berkurangnya kas di Bendahara Pengeluaran		

Jurnal SAKTI:

Tanggal	Deskripsi	Debit	Kredit
20 Des	Penerimaan Pengembalian UP	Rp40.000.000	
	Kas di Bendahara Pengeluaran		Rp40.000.000
20 Des	Uang Muka dari KPPN	Rp40.000.000	
	Penerimaan Pengembalian UP		Rp40.000.000
	Mencatat jurnal akrual berkurangnya kas di Bendahara Pengeluaran		

5. Transaksi Penyetoran Kembali Sisa UP

Pada akhir tahun anggaran terdapat sisa UP sebesar Rp10.000.000 dan disetorkan ke rekening Kas Umum Negara pada tanggal 30 Desember. Jurnal yang terbentuk adalah:

Jurnal SAIBA:

Tanggal	Deskripsi	Debit	Kredit
30 Des	Uang Muka dari KPPN	Rp10.000.000	
	Kas di Bendahara Pengeluaran		Rp10.000.000
	Mencatat jurnal akrual berkurangnya kas di Bendahara Pengeluaran		

Jurnal SAKTI:

Tanggal	Deskripsi	Debit	Kredit
30 Des	Penerimaan Pengembalian UP	Rp10.000.000	
	Kas di Bendahara Pengeluaran		Rp10.000.000

20 Des	Uang Muka dari KPPN	Rp10.000.000	
	Penerimaan Pengembalian UP		Rp10.000.000
Mencatat jurnal akrual berkurangnya kas di Bendahara Pengeluaran			

PENUTUP

Dari komparasi jurnal transaksi UP dalam aplikasi SAIBA dan aplikasi SAKTI di atas dapat dilihat bahwa titik-titik pengakuan transaksi dalam aplikasi SAKTI lebih rinci daripada aplikasi SAIBA. Dalam aplikasi SAKTI, transaksi UP dicatat saat terbitnya kuitansi (untuk belanja barang persediaan dan belanja modal aset tetap/lainnya intrakomptabel), saat terbitnya SPP, dan saat terbitnya SP2D. Sementara itu, dalam aplikasi SAIBA transaksi UP dicatat hanya pada saat terbitnya SP2D saja. aplikasi SAKTI dapat menunjukkan posisi pos-pos laporan keuangan secara lebih *real time*, dibandingkan aplikasi SAIBA.

Jika dilihat secara keseluruhan selama satu periode, sesungguhnya jurnal transaksi aplikasi SAIBA dan Aplikasi SAKTI akan menghasilkan laporan keuangan tahunan yang sama. Jurnal transaksi dalam aplikasi SAIBA dibuat lebih sederhana, menunggu SP2D terbit baru dicatat. Namun, untuk laporan keuangan interim (bagian tahun: bulanan, triwulanan, dan semesteran) bisa saja berbeda. Hal ini terjadi ketika tanggal SPP berbeda bagian tahun (bulanan, triwulanan, dan semesteran) dengan tanggal SPM/SP2D.

Dalam hal laporan keuangan interim pemerintah, aplikasi SAKTI dapat menyajikan informasi posisi keuangan (aset maupun kewajiban) maupun kinerja operasional keuangan (beban-beban operasional) yang lebih akurat. Informasi keuangan yang lebih akurat tentu saja sangat bermanfaat untuk pengambilan keputusan yang tepat, baik oleh manajemen pemerintah sendiri maupun oleh pengguna luar (*external user*).

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah pada Pemerintah Pusat.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Modul SAKTI, Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan.

R. EHA SALHAH
WIDYAISWARA PUSDIKLAT BEA DAN CUKAI

KLASIFIKASI *HARMONIZED SYSTEM* JENIS BARANG: ANTIBIOTIK BAHAN BAKU OBAT

Dalam praktek kepabeanan sering terkendala perbedaan klasifikasi barang berdasarkan *Harmonized System* (HS). Importir/eksportir bersikukuh atas pilihan HS klasifikasi barang yang diimpor/ diekspornya. Sementara itu, petugas Bea dan Cukai telah menetapkan sehingga importir/eksportir terpaksa harus melunasi selisih kekurangan Bea Masuk atau mempertaruhkan jaminan agar dapat melanjutkan dengan proses keberatan dan banding. Perselisihan timbul karena pilihan HS-nya berbeda dengan yang ditetapkan oleh petugas Bea dan Cukai. Timbul anggapan seakan-akan petugas Bea dan Cukai selalu menetapkan klasifikasi barang pada HS yang mempunyai tarif Bea Masuk (BM) yang lebih tinggi atau ketetapan itu dapat mengakibatkan importasi menjadi terkena ketentuan tata niaga ekspor/impor (larangan/pembatasan). Sebenarnya dasar yang digunakan oleh petugas Bea dan Cukai dapat dipelajari. Pemahaman atas penetapan HS akan menjadi pengetahuan berharga sehingga berikutnya nanti tidak perlu lagi terjadi perselisihan yang dalam prosesnya memakan waktu, biaya, dan energi untuk sampai pada suatu kesepakatan.

Berikut ini akan dipaparkan bagaimana mengklasifikasikan barang menurut *Harmonized System* atas jenis barang “*Meropenem sterile*”.

PERMASALAHAN

Perbedaan klasifikasi terkait barang tersebut di atas yaitu, apakah diklasifikasikan berdasarkan *Harmonized System* dalam pos 29.41 (antibiotik) atau 30.03 (obat tidak dalam dosis tertentu atau tidak dalam kemasan eceran). Jenis barang yang dipermasalahkan tersebut memiliki spesifikasi sebagaimana diuraikan dalam butir **Identifikasi**, dan selanjutnya diklasifikasikan dalam butir **Klasifikasi**.

IDENTIFIKASI

Identifikasi barang adalah tahapan awal dan penting yang paling menentukan keakuratan dalam penetapan klasifikasi. Sebelum dilakukan penetapan, untuk produk kimia perlu dilakukan analisis lebih dalam apakah suatu barang merupakan senyawaan tunggal atau bukan. Dalam hal bukan senyawaan tunggal maka perlu didalami apa saja komponen campurannya, dan fungsi/peranan dari masing-masing komponen. Untuk keperluan klasifikasi, tidak hanya komponen yang penting didalami tetapi kadang-kadang juga proses, bahan baku masing-masing penyusunnya, penggunaan

akhir dari barangnya, dan lain-lain. Hal ini bergantung pada syarat dan ketentuan dari masing-masing pos HS.

Mengapa syarat dan ketentuan dari masing-masing pos HS penting dan harus dipatuhi? *Harmonized System* (HS) adalah sistem penggolongan barang dan bukan daftar barang sehingga seringkali terdapat jenis barang yang bisa dikelompokkan pada beberapa pos HS. Tanpa adanya syarat dan ketentuan pada masing-masing pos HS maka dapat menimbulkan perbedaan pendapat, kesimpangsiuran, atau ketidakseragaman penetapan dan ketidakpastian. Oleh karena itu, *World Customs Organization* (WCO) dan semua negara anggota WCO telah menyepakati untuk keperluan penetapan klasifikasi barang dalam rangka perdagangan internasional (ekspor/impor) berlaku prinsip-prinsip dalam Ketentuan Umum Menginterpretasi HS (KUMHS). Selanjutnya, untuk lebih mempermudah klasifikasi barang dapat menggunakan beberapa publikasi pelengkap yang digunakan, seperti *Explanatory Notes* yang merupakan interpretasi resmi (*official interpretation*) dari HS.

Mari kita lihat identifikasi atas “*Meropenem sterile*”. Berdasarkan informasi dari *Certificate of Analysis* (CoA) dan/atau *Material Safety Data sheet* (MSDS) serta referensi lainnya, jenis barang tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Meropenem sterile, merupakan bubuk kristal putih yang sangat higroskopis campuran dari Sterile Meropenem (81.7%) dan Sodium Carbonate (15.64%) sebagaimana tercantum dalam *Certificate of Analysis* (CoA).

Meropenem adalah **antibiotik betalaktam golongan lain** yang bekerja dengan menghambat biosintesa dinding sel bakteri dengan berikatan pada beberapa penicillin-binding protein (MIMS, 2018). Sedangkan **Natrium karbonat adalah salah satu excipient yang digunakan sebagai agen buffer dan agen alkalizing**. Untuk terapi, sodium carbonate juga digunakan **sebagai oral antacid (menetralisir asam lambung)**, (Raymond, 2009). Perlu dipahami bahwa sediaan farmasi yang beredar merupakan suatu sistem yang kompleks, dimana terdiri dari banyak komponen termasuk zat aktif. Eksipien

merupakan suatu zat selain bahan obat atau *pro-drug* yang termasuk pada proses pembuatan atau terdapat pada sediaan farmasi untuk tujuan tertentu. Eksipien dikelompokkan berdasarkan fungsi pada saat formulasi, seperti bahan pengikat (*binder*), bahan penghancur (*disintegrant*), dan lain-lain (*Emulsifying agent, suspending agent, viscosity-increasing agent, acidifying agent, buffering agent alkalizing agent, dan lain-lain*)⁽²⁾. Eksipien dapat dikatakan sebagai komponen yang sangat diperlukan selain dari bahan aktif obat itu sendiri. Sebagian besar formulasi obat menggunakan eksipien dengan proporsi yang lebih banyak dibandingkan bahan aktif obat.

KLASIFIKASI

Harmonized Commodity Description and Coding System atau yang dikenal secara lebih luas sebagai *Harmonized System* (HS) adalah suatu sistem penggolongan dan penomoran barang yang digunakan secara seragam di seluruh dunia untuk keperluan pemungutan bea masuk, statistik, dan lainnya. HS diberlakukan berdasarkan konvensi internasional yang ditandatangani tanggal 14 Juni 1983, dan disusun dalam naskah teks asli bahasa Inggris (menggunakan English ejaan *british*) dan Perancis, sehingga praktek yang lazim dilaksanakan di WCO dalam hal terdapat perbedaan interpretasi dan definisi kata dalam HS dapat dikembalikan pada definisi menurut kedua bahasa tersebut, sepanjang tidak diatur secara lebih spesifik dalam *Explanatory Notes* atau referensi lainnya dalam HS.

Untuk keperluan penetapan klasifikasi, WCO telah membuat Ketentuan Umum untuk Menginterpretasi HS (KUMHS) yang merupakan bagian terpenting yang harus dipahami sebelum melangkah lebih jauh untuk mengklasifikasikan barang menggunakan HS. KUMHS berisi 6 (enam) prinsip dasar yang harus dipatuhi dalam mengklasifikasi barang. Tanpa mengacu KUMHS, akan mengakibatkan kesalahan dalam penetapan klasifikasi (*missclassification*) dan menimbulkan ketidakseragaman persepsi.

Terkait identifikasi atas "*Meropenem sterile*", ada dua pos yang dipermasalahkan, yaitu pos 29.41 dan 30.03. Sebelum dilakukan penetapan klasifikasi, harus dipahami terlebih dahulu syarat untuk dapat diklasifikasikan pada pos 29.41 dan syarat pada pos 30.03. Syarat untuk dapat diklasifikasikan pada suatu bab/pos/subpos biasanya diatur dalam catatan bagian/catatan bab/catatan subpos, atau kadang dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan Penjelasan (*Explanatory Notes*). Disebutkan dalam KUMHS 1 bahwa:

"Judul dari Bagian, Bab, dan Sub-bab dimaksudkan hanya untuk mempermudah referensi saja; untuk keperluan hukum, klasifikasi harus ditentukan berdasarkan uraian yang terdapat dalam pos dan berbagai Catatan Bagian atau Bab yang berkaitan serta berdasarkan ketentuan berikut ini, asalkan pos atau Catatan tersebut tidak menentukan lain."

Dengan demikian, memperhatikan uraian pos dan berbagai catatan sangat penting dalam penetapan klasifikasi.

Disamping KUMHS, catatan-catatan dalam HS merupakan bagian integral yang harus diperhatikan. Catatan-catatan tersebut mempunyai kekuatan hukum sama seperti uraian pos atau sub-pos dan bersifat mengikat.

Berikut ini syarat klasifikasi pada bab 29 (termasuk pos 29.41) menurut catatan 1 bab 29, yaitu antara lain:

1. Senyawa organik yang mempunyai rumus kimia tersendiri, mengandung kotoran maupun tidak;
2. Produk yang dilarutkan dalam air; yang dilarutkan dalam pelarut lainnya asalkan pelarutannya merupakan cara yang lazim serta diperlukan untuk menyiapkan produk tersebut dan dilakukan semata-mata untuk alasan keamanan atau untuk pengangkutannya, dan pelarut tersebut tidak menjadikan produk tersebut hanya cocok untuk penggunaan khusus daripada untuk penggunaan umum; yang ditambah dengan penstabil (termasuk bahan

anti-caking), yang diperlukan untuk pengawetan atau pengangkutannya; yang ditambah dengan bahan anti-dusting atau zat pewarna atau zat bau-bauan, ditambahkan untuk memudahkan identifikasinya atau untuk alasan keamanan, asalkan tambahan itu tidak menjadikan produk tersebut hanya cocok untuk penggunaan khusus daripada untuk penggunaan umum;

Pada prinsipnya, bab 29 berlaku untuk senyawa organik tunggal yang mempunyai rumus kimia tersendiri. Penambahan zat-zat lain diperbolehkan sepanjang memenuhi catatan 1 bab 29 tersebut di atas. Penambahan zat-zat diluar zat yang tercantum pada catatan 1 bab 29 tentu telah keluar dari konteks bab 29. Karena itu penting didalam lagi jika suatu barang berupa produk kimia yang terdiri dari campuran perlu dipastikan peranan masing-masing komponennya apakah memenuhi syarat catatan 1 bab 29 atau tidak. Pendekatan "asumsi" saja tidak cukup dan akan menimbulkan banyak persepsi. Identifikasi barang harus dilakukan dengan cara analisis dan kajian literatur masing-masing komponen untuk memberikan kepastian.

Bahkan seandainya ada suatu produk kimia mengandung zat tambahan, misalkan zat penstabil dan ditambahkan dengan *anti dusting* yang ternyata selain untuk pengawetan atau pengangkutannya, memudahkan identifikasinya atau untuk alasan keamanan juga mempunyai tujuan lain yang khusus maka zat tambahan tersebut tidak memenuhi syarat catatan 1 bab 29 huruf g sehingga tidak dapat diklasifikasikan pada bab 29. Atau contoh lain, keberadaan pengotor (*impurities*) methanol pada methyl acetate diperbolehkan menurut catatan 1 bab 29 huruf a, namun ternyata pengotor methanol ini juga berfungsi untuk meningkatkan kepolaran methyl acetate. Oleh karena itu, keberadaan methanol tidak memenuhi syarat catatan 1 bab 29 huruf g (tambahan itu menjadikan produk tersebut cocok untuk penggunaan khusus). Penjelasan ini tidak diuraikan

dalam KUMHS tetapi dijelaskan detail dalam Catatan Penjelasan (*Explanatory Notes*) yang merupakan interpretasi resmi (*official interpretation*) HS dari WCO.

Syarat dan ketentuan yang diatur dalam KUMHS, uraian pos/subpos, catatan bagian/bab/subpos, dan Catatan Penjelasan (*Explanatory Notes*) sangat penting dan menjadi rambu-rambu dalam penetapan klasifikasi. Dapat atau tidaknya suatu barang diklasifikasikan dalam suatu pos bergantung dari syarat dan ketentuan tersebut dan tidak boleh dipahami secara tidak lengkap. Hal ini lah yang menjadikan klasifikasi barang menurut *Harmonized System* menjadi sangat unik.

Syarat klasifikasi pada bab 30 (termasuk pos 30.03) menurut catatan Penjelasan (*Explanatory Notes*) 2017 antara lain:

1. Meliputi olahan untuk pengobatan luar maupun dalam atau untuk pencegahan penyakit manusia atau hewan. Olahan tersebut diperoleh **dari pencampuran dua zat atau lebih**. Namun apabila dikemas dalam dosis tertentu atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran, maka termasuk dalam **pos 30.04**.

2. Namun demikian, tidak berarti bahwa olahan yang terdaftar dalam farmakope resmi, obat-obat paten, selalu diklasifikasikan dalam **pos 30.03**. Sebagai contoh, olahan anti jerawat yang dibuat terutama untuk membersihkan kulit dan tidak cukup mengandung kandungan aktif yang tinggi untuk dipandang mempunyai efek penyembuhan atau pencegahan penyakit terhadap jerawat diklasifikasikan dalam **pos 33.04**.
3. *Preparations containing a single pharmaceutical substance together with an excipient, sweetening agent, agglomerating agent, support etc.*

Suatu zat farmasi yang ditambahkan dengan suatu *excipient*, sudah memenuhi syarat sebagai preparasi yang dapat diklasifikasikan pada pos 30.03 meskipun belum memiliki dosis dan belum dikemas dalam kemasan penjualan eceran. Preparasi yang sudah memiliki dosis atau sudah dikemas untuk penjualan eceran dicakup pada uraian pos 30.04.

Bab 30 (Produk Farmasi) tidak hanya mencakup obat-obatan yang siap dikonsumsi tetapi juga a.l.:

1. Obat terdiri dari dua atau lebih konstituen yang telah dicampur bersama-sama untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, tidak disiapkan dalam dosis tertentu (30.03) atau;
2. Obat terdiri dari dua atau lebih konstituen yang telah dicampur bersama-sama untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, tidak dalam bentuk kemasan untuk penjualan eceran (30.03);
3. Bahkan senyawa aktif tunggal untuk keperluan terapeutik atau profilaktik yang sudah memiliki dosis **atau** dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran (30.04).

Hal ini perlu ditegaskan untuk meluruskan anggapan yang salah bahwa senyawa organik murni/ tunggal harus selalu diklasifikasikan pada bab 29. Atau bahwa preparasi adalah bahan baku obat dan selalu diklasifikasikan pada bab 29. Preparasi harus dipahami sebagai campuran, bisa jadi intermediet yang masih memerlukan penambahan atau proses lanjut tetapi juga bisa berupa bahan jadi yang tinggal dikemas untuk penjualan



eceran dengan mempertimbangkan dosis sesuai tatalaksana dalam pengobatan.

Terkait klasifikasi untuk barang yang sedang dipermasalahkan, dapat dijelaskan sbb:

- *Meropenem sterile*, merupakan campuran dari *Sterile Meropenem* (81.7%) dan *Sodium Carbonate* (15.64%). Berdasarkan identifikasi sebagaimana dijelaskan di atas, dapat diketahui bahwa *meropenem* adalah antibiotik dan *sodium carbonate* adalah excipien (yang berperan sebagai agen *buffer* dan agen *alkalizing*) serta juga berfungsi sebagai *antacid* (menetralkan asam lambung). *Sodium carbonate* tidak memenuhi syarat sebagai zat pengotor atau zat tambahan yang diperbolehkan menurut catatan 1 bab 29 karena *sodium carbonate* bukan zat penstabil, bukan zat *anti caking*, bukan zat *anti-dusting* atau zat pewarna atau zat bau-bauan. *Sodium carbonate* ditambahkan karena memiliki tujuan tertentu, yaitu berfungsi ganda sebagai *excipient* dan *antacid* (zat penetralisir asam lambung).
- Dengan demikian campuran *Sterile Meropenem* (81.7%) dan *Sodium Carbonate* (15.64%) lebih tepat dan memenuhi syarat pada pos 30.03 karena merupakan preparasi dari senyawa farmasi (*antibiotic*) dengan tambahan *excipient*, obat yang terdiri dari dua atau lebih konstituen yang telah dicampur bersama-sama untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, tidak disiapkan dalam dosis tertentu atau tidak dalam bentuk kemasan untuk penjualan eceran (subpos 3003.20.00).

SIMPULAN

Berdasarkan uraian Identifikasi dan Klasifikasi diatas, *Meropenem sterile* mempunyai tambahan zat yang sengaja ditambahkan dengan maksud dan fungsi tertentu dan bukan dari jenis zat tambahan yang diperbolehkan sebagaimana tercantum pada catatan 1 bab 29. *Sodium carbonate* berfungsi sebagai *excipient* (agen *buffer* dan agen *alkalizing*)

serta juga berfungsi sebagai *antacid*.

Dengan demikian, lebih tepat **diklasifikasikan dalam pos 30.03** (subpos 3003.20.00) berdasarkan prinsip KUMHS 1 (catatan 1 bab 29), dengan pertimbangan bahwa barang dimaksud memenuhi seluruh kriteria yang dipersyaratkan dalam pos 30.03.

DAFTAR PUSTAKA

The Monthly Index of Medical Specialities (MIMS), 2018, (<http://www.mims.com/indonesia/drug/info/meropenem/?type=brief&mtype=generic>, Diakses Tanggal 9 Agustus 2018).

Raymond C. et.al, 2009, *Handbook of Pharmaceutical Excipients 6th edition*, Pharmaceutical Press, UK and USA.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK NO 17/PMK.010/2018.

World Customs Organization, 2017, *Explanatory Notes*, Brussel-Belgia.



Syarat Calon Peserta Tugas Belajar
PMK Nomor 18/PMK.01/2009

JENIS BEASISWA GELAR

MASUK MELALUI PPSDM*

- Beasiswa Pendidikan Indonesia dari LPDP
- Beasiswa AAS dari pemerintah Australia
- Beasiswa KOICA dari pemerintah Korea Selatan
- New Zealand ASEAN Scholarship dari pemerintah New Zealand
- Beasiswa Islamic Development Bank (IDB)
- Beasiswa Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO)
- Beasiswa Pusbindiklatren Bappenas
- Beasiswa Pendidikan Ilmu Kepegawaian BKN
- dan semua program yang ditawarkan ke Kementerian Keuangan

*Jenis beasiswa ini PPSDM hanya menyelenggarakan seleksi administrasi untuk kemudian mengikuti mekanisme seleksi dari pemberi beasiswa

DIKELOLA PPSDM

- PHRDP didanai dari dana pinjaman JICA. Proyek terakhir PHRDP III berakhir tahun 2015.
- SPIRIT didanai dari dana pinjaman Bank Dunia. Proyek SPIRIT dari tahun 2011 s.d. 2017.
- FETA didanai dari dana rupiah murni APBN. Proyek FETA dimulai dari tahun 2015.

JENIS BEASISWA NONGELAR

- *Executive Training* untuk pejabat Eselon I dan II Kementerian Keuangan
- *Short Course/Pelatihan Nongelar* dalam dan luar negeri program PHRDP dan SPIRIT

SEBARAN PENERIMA BEASISWA

Berdasarkan data Sebaran Penerima Beasiswa per 12 November 2017



PPSDM[†] Scholarship



SELEKSI BEASISWA GELAR

dari Kementerian Keuangan



[†] Diklat Teknis Bahasa Asing & Diklat Teknis Persiapan Studi Pascasarjana

JENIS PROGRAM BEASISWA

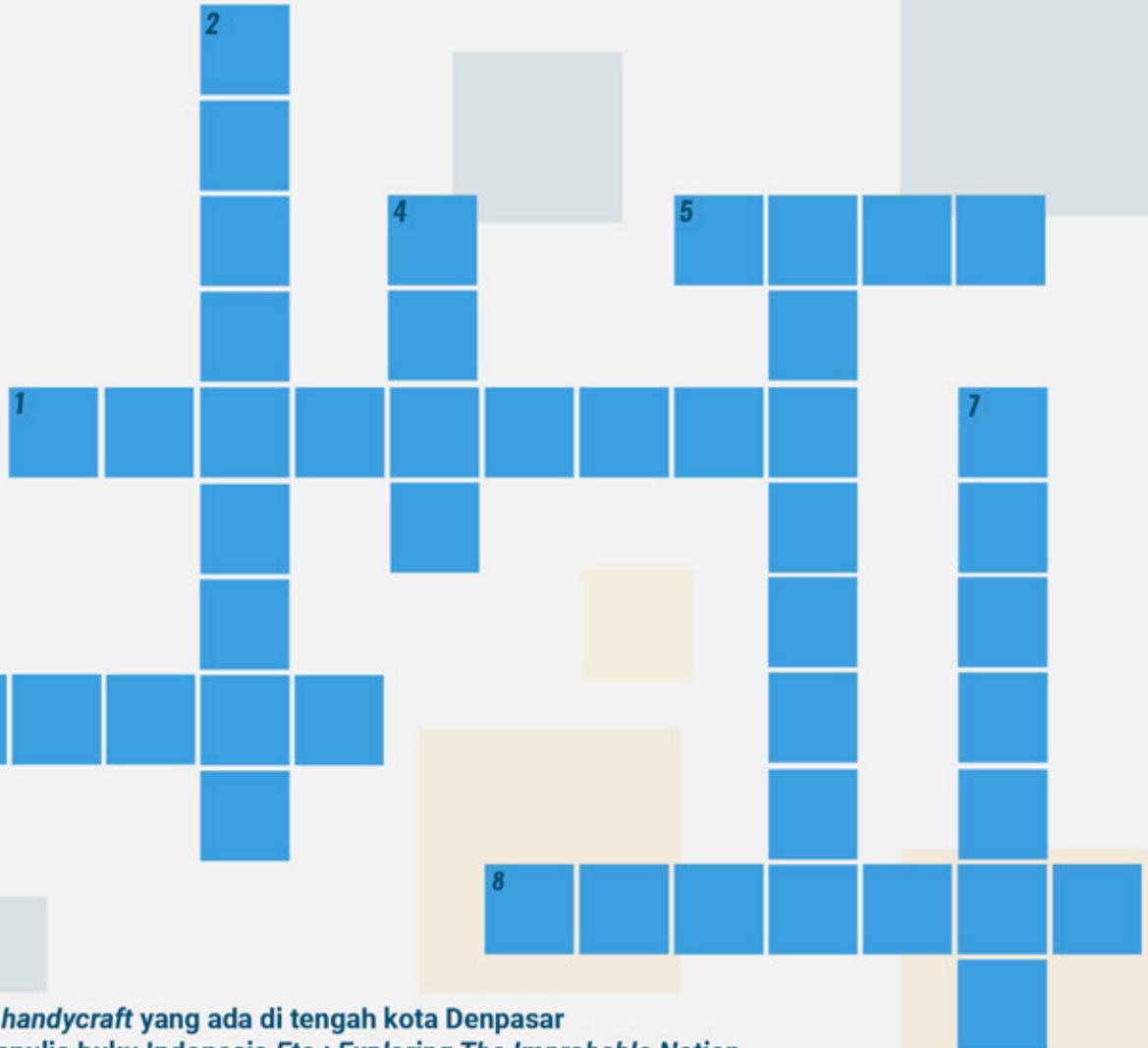
MASTER OVERSEAS (S2 Luar Negeri)

Program studi disesuaikan dengan Rencana Program Pengembangan SDM tiap Eselon I Kementerian Keuangan. Perguruan tinggi atau program studi tujuan dengan peringkat 100 terbaik dunia menurut lembaga pemeringkatan seperti THE, QS World University, dll.

MASTER LINKAGE (S2 Pertautan)

Sesuai dengan dual degree program yang ditawarkan lembaga pendidikan atau universitas.





MENDATAR

1. Salah satu sentra *handycraft* yang ada di tengah kota Denpasar
3. Nama belakang penulis buku Indonesia *Etc.: Exploring The Improbable Nation*
5. Seminggu Bersama Keluarga Kemenkeu
8. Universitas tempat studi peraih beasiswa yang diangkat di rubrik 'Alumni' edisi kali ini

MENURUN

2. Salah satu kota penyelenggara Asian Games Tahun 2018
4. Model pembelajaran daring menggunakan media grup Whatsapp
6. Nama salah satu maskot dari Asian Games Tahun 2018
7. Nama depan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan saat ini

CARA BERPARTISIPASI:

- Follow akun Instagram BPPK: @bppkkemenkeu;
- Jawaban lengkap dikirim via email ke alamat: edukasikeuangan@kemenkeu.go.id;
- Anda hanya boleh mengirimkan jawaban satu kali dan tidak diperkenankan melakukan koreksi;
- Cantumkan nama dan alamat lengkap Anda di badan email dengan subjek: Teka-Teki Edukasi 47;
- Ikuti ketentuan tambahan yang tercantum di *post* promosi majalah Edukasi Keuangan Edisi 47; di akun Instagram BPPK;
- Pengumuman pemenang akan disampaikan di majalah Edukasi Keuangan Edisi 48 dan melalui Instagram BPPK, dan;
- Pemenang yang beruntung akan mendapatkan hadiah menarik dari tim redaksi.

RETYAN LAKSITA MUTIARY

SMART CLASSROOM BPPK:

MENEMBUS CAKRAWALA DUNIA TANPA BATAS

“Semudah menulis di papan tulis, secepat menggunakan layar sentuh, dan secepat mengakses pengetahuan dari mana saja dan kapan saja”. Hal itulah yang dapat kita rasakan ketika memasuki ruang pintar (*smart classroom*) BPPK Kemenkeu Corpu.

Kekuatan teknologi semakin mendorong tersebarnya informasi dan pengetahuan dari dan ke seluruh dunia menembus batas ruang dan waktu. Seiring berjalannya waktu, kolaborasi antara pendidikan, pelatihan, dan teknologi semakin berkembang pesat. Kecanggihan teknologi memberikan kemudahan yang signifikan tidak terkecuali pada kegiatan pembelajaran.

Dengan berkembangnya penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi ada beberapa pergeseran dalam proses pembelajaran yaitu dari ruang kelas ke dimana dan kapan saja, dari kertas ke “*on line*” atau saluran, dan dari fasilitas fisik ke fasilitas jaringan kerja (Rosenberg, 2001: 8).



FOTO : BIMA LINGGA SAKTI

Dunia pendidikan memerlukan sebuah inovasi baru seiring perkembangan teknologi yang pesat. Berawal dari kebutuhan dalam sistem pembelajaran dan implementasi dari Kemenkeu *Corporate University* (Kemenkeu Corpu), Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) menghadirkan *smart classroom*. *Smart classroom* merupakan terobosan/inovasi terbaru di BPPK. Konsep *smart classroom* dimunculkan sejak akhir 2016 dan direalisasikan setelah ditetapkannya Keputusan Kepala BPPK Nomor KEP-148/PP/2017 tentang Pedoman Standar Ruang Kelas Pintar (*Smart Classroom*) yang ditetapkan pada 22 Desember 2017 lalu.

Seperti mengutip latar belakang Keputusan Kepala BPPK tersebut bahwa implementasi Kementerian Keuangan *Corporate University* ini membutuhkan dukungan dari berbagai bidang, salah satunya adalah infrastruktur. Adapun salah satu dukungan infrastruktur yang akan dilaksanakan adalah ruang kelas pintar (*smart classroom*) di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.



Keberadaan *smart classroom* ini memberikan kesempatan peserta pembelajaran maupun pengajar mendalami sebuah cara belajar yang lebih interaktif, kreatif, dan menyenangkan dengan berorientasi pada teknologi terkini. *Smart classroom* dapat meningkatkan sumber daya manusia keuangan negara melalui sistem pelatihan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

APA ITU SMART CLASSROOM?

Smart classroom, berasal dari kata 'smart' yang artinya cerdas/pintar, dan 'classroom' yang artinya ruang kelas, jadi *smart classroom* adalah ruang kelas pintar.

Smart classroom merupakan ruang kelas yang dikonsepsi dengan memadukan teknologi digital dan pendidikan. Bisa juga disebut sebagai konsep pendidikan dengan metode digital. Peserta pembelajaran berkesempatan untuk memanfaatkan teknologi, *device/tablet*, di dalam kegiatan pembelajaran.

MENGAPA ADA SMART CLASSROOM DI BPPK?

Berawal dari kebutuhan dalam sistem pembelajaran dan implementasi dari Kemenkeu Corp, BPPK sebagai inisiator memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan visi misi Kementerian Keuangan, dengan mewujudkan *link and match* antara pembelajaran, pengelolaan pengetahuan, dan penerapan nilai-nilai dengan target kinerja Kementerian Keuangan bagi sumber daya manusia keuangan negara yang lebih berkualitas.

Proses pembelajaran pada umumnya lebih mudah dilakukan jika melalui media *audio visual*. Tidak cukup hanya sekedar membuka halaman demi halaman dari sebuah buku ataupun mendengarkan materi dari sang pengajar. Sementara peserta pembelajaran dalam sebuah kelas memiliki berbagai perbedaan kemampuan pembelajaran dan pemahaman, namun mereka dituntut untuk berpikir kreatif dan berinovasi. Tentunya keberadaan *smart classroom* ini memberikan kontribusi yang luar biasa untuk mencapai pemahaman yang senantiasa lebih cepat dan luas.

Disamping itu, kolaborasi dan interaksi antara pengajar dan peserta pembelajaran maupun antar peserta pembelajaran akan terjalin lebih dinamis, menurut teori humanisme Maslow, pendidikan tidak hanya terfokus pada perkembangan intelegensi semata. Namun ada nilai humanis yang perlu ditumbuhkembangkan, sehingga kenyamanan komunikasi di dalam kelas pun lebih terjamin.

LALU, APA SIH KEUNGGULAN SMART CLASSROOM DI BPPK?

Sistem pembelajaran tidak melulu harus melalui tatap muka. Efisiensi melalui sebuah perangkat *smart control* sebagai kendali dari beberapa fungsi perangkat, konvensional dan *blended learning* yang dapat dilakukan dari ruangan *smart classroom*, pembelajaran dapat dilakukan dengan seorang pengajar pada *smart classroom* dan beberapa peserta dari berbagai lokasi yang berbeda (pembelajaran jarak jauh/*live streaming*), dimana kini tidak ada lagi batasan waktu dan tempat dalam belajar.

FOTO : BIMA LINGGA SAKTI



Selain itu, strategi transformasi dari pembelajaran konvensional ke pembelajaran digital yang bermakna, menarik, dan terhubung ini, memungkinkan peserta pembelajaran untuk mengakses sumber-sumber digital dan berinteraksi dengan sistem pembelajaran dimanapun dan kapanpun.

Kecanggihannya adanya *smart classroom* disini adalah kontrol ruangan dilakukan melalui *touch screen controller* (*control audio, video, lighting*) yang dioperasikan oleh pengajar, digunakan untuk mengontrol seluruh perangkat multimedia yang ada di dalam kelas, peserta/*user* dapat memilih beberapa *source* yang ditampilkan pada *interactive projector*, pengajar dan peserta pembelajaran dapat dengan mudah melakukan kolaborasi, *sharing file* melalui *interactive projector*, dan seluruh pembelajaran direkam secara otomatis dan dapat diakses.

APA SAJA SARANA DAN FASILITAS SMART CLASSROOM DI BPPK?

Demi menunjang kegiatan pembelajaran yang berkualitas, *smart classroom* harus memiliki pedoman standar yang harus dipenuhi. Pedoman standar *smart classroom* BPPK ditujukan untuk seluruh Pusat Pendidikan dan Pelatihan dan Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan di lingkungan BPPK.

Keberadaan *smart classroom* ini tentu saja membutuhkan proses pembangunan yang berkesinambungan. *Smart classroom* memiliki standar yang mengacu pada standar sarana dan prasarana kelas reguler yang ditambahkan dengan perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Pastinya untuk jenis perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang dibutuhkan pada setiap ruangan *smart classroom* berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan masing-masing pembelajaran.

Jenis teknologi yang tersedia di *smart classroom* tergantung pada tingkat klasifikasinya. Peralatan seperti komputer,

smart control, digital OHP/Document Scanner, Audio System Customized, perangkat Closed Circuit Television (CCTV), Projector Interactive, video system, Integrated UPS, Lighting System, dan Projector linked Tablet, alat perekam suara dan aktivitas beserta perangkat penyimpanan data merupakan beberapa perangkat yang wajib dibutuhkan untuk menunjang sarana dan fasilitas *smart classroom*.

APA SAJA KEGIATAN YANG TELAH DILAKUKAN DI SMART CLASSROOM BPPK?

Pusdiklat Keuangan Umum telah menyelenggarakan Pelatihan Penyusunan Materi Pembelajaran Berbasis Multimedia pada pertengahan Juli lalu. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi para punggawa keuangan negara Kementerian Keuangan, khususnya widyaiswara dan dosen, dalam menyusun materi pembelajaran berbasis multimedia. Desain pembelajaran dibuat sedemikian rupa agar peserta dapat menggunakan dan memanfaatkan infrastruktur *smart classroom* dalam penyusunan/penyampaian materi pembelajaran.

Untuk rencana kegiatan mendatang yang berkaitan dengan pemanfaatan penggunaan *smart classroom*, akan dilaksanakan beberapa kegiatan meliputi pelaksanaan kegiatan *Global Development Learning Network (GDLN) Seminar Series* dan pelatihan peningkatan kapasitas pengguna *Smart Classroom* pada bulan September 2018.

LANTAS, APA KENDALA YANG DIHADAPI DAN HARAPAN KE DEPAN DENGAN ADANYA SMART CLASSROOM DI BPPK?

Pada dasarnya kecanggihannya teknologi yang berkembang pesat, harus terintegrasi dengan kemampuan sumber daya manusia yang ada. Di lingkungan pembelajaran, tidak hanya menuntut para peserta pembelajaran untuk “melek” teknologi,

namun juga para pengajarnya. *Smart Classroom* merupakan sebuah resolusi baru BPPK yang sampai dengan saat ini masih terus dilakukan “*continuous improvement*” baik dari segi sarana prasarana maupun sumber daya manusia yang mengaplikasikannya.

Menurut Earle (2002), Berkaitan dengan *smart classroom*, beberapa hambatan terhadap integrasi teknologi di dalam kelas antara lain karena adanya faktor ekstrinsik bagi pengajar seperti akses, waktu, dukungan, sumber daya, dan pelatihan. Sedangkan faktor kekuatan yang bersifat intrinsik seperti sikap, kepercayaan, praktik, dan resistensi. Untuk saat ini di BPPK belum banyak pengajar yang mengenal penggunaan *Smart Classroom* dengan baik ataupun sumber daya manusia yang sudah mumpuni untuk menjadi *administrator/operator smart classroom*.

Harapan ke depan, kehadiran *smart classroom* ini dapat meningkatkan mutu sarana dan prasarana, menciptakan sumber daya manusia keuangan negara yang handal, akuntabel, dan kompeten dalam mengaplikasikan teknologi *Smart Classroom* yang nantinya secara otomatis juga meningkatkan kualitas pembelajaran BPPK yang sesuai dengan perwujudan pengimplementasian Kemenkeu Corpu.

BIMA LINGGA SAKTI

Mendengarkan Aktif

Mendengar adalah salah satu kemampuan penting yang bisa Anda pelajari. Seberapa baik Anda mendengar mempunyai pengaruh terhadap kualitas hubungan dengan orang lain dan juga pekerjaan Anda sehari – hari. Mempunyai indra pendengaran membuat kita berpikir bahwa kita bisa mendengar dengan baik. Nyatanya sebagian besar dari kita tidak seperti itu. Riset yang dilakukan di beberapa universitas mengungkapkan bahwa kita hanya mengingat antara 25 sampai 50 persen dari apa yang kita dengar. Jadi jika Anda berbicara dengan teman, saudara, pelanggan, atasan, atau pasangan Anda untuk 15 menit, kemungkinan mereka hanya akan memperhatikan kurang dari setengah perkataan Anda dan detail pembicaraan yang terjadi. Begitu pula sebaliknya.

Kemampuan mendengar adalah kemampuan yang dapat kita tingkatkan. Dengan menjadi pendengar yang baik, Anda bisa meningkatkan produktivitas dalam bekerja dan juga meningkatkan kemampuan untuk memengaruhi, mengajak, serta bernegosiasi.

Terlebih lagi Anda dapat menghindari konflik dan kesalahpahaman. Semua ini dibutuhkan dalam pekerjaan dan berorganisasi.

Cara untuk meningkatkan kemampuan mendengar adalah dengan berlatih untuk menjadi pendengar aktif atau mendengarkan aktif (*active listening*). Mendengarkan aktif (*active listening*) adalah sebuah sikap memperhatikan dan mendengarkan setiap perkataan atau perbincangan orang lain. Sikap mendengarkan yang terfokus dan selalu memberikan respons komunikasi non verbal dan verbal yang sederhana. Mendengarkan aktif (*active listening*) berbeda dengan mendengar (*hearing*). Mendengarkan aktif merupakan sebuah proses yang kompleks, melibatkan semua panca indera dan bagian-bagian tubuh lain secara aktif sehingga pesan yang disampaikan menjadi bermakna. Sedangkan mendengar merupakan respon fisiologis saat menerima stimulus yang berupa suara dengan indera pendengar.

Konsep 'mendengarkan aktif' (*active listening*) diperkenalkan oleh Carl Rogers (1951) dalam buku *Client Centered Therapy* dan dicetak ulang sebagai artikel "*Active Listening*" (1976). Mendengarkan disebut 'aktif' karena pendengar mempunyai tanggung jawab tertentu, yaitu ia tidak secara pasif menyerap kata-kata yang diucapkan orang kepadanya, tetapi secara aktif menangkap fakta-fakta dan perasaan-perasaan dalam apa yang didengar. Selain itu, dengan mendengarkan ia berusaha agar pembicara dapat mengatasi permasalahannya. "Mendengarkan aktif adalah alat yang paling efektif untuk perubahan kepribadian dan pengembangan kelompok" (Rogers, 1976: 543).

Ada beberapa teknik mendengarkan aktif yang dapat membantu Anda untuk menjadi pendengar yang aktif :

- **Memperhatikan pembicaraan.** Beri lawan bicara Anda perhatian penuh yang tidak terbagi dengan kegiatan lain. Dengarkan secara penuh maksud dan tujuan yang disampaikan oleh lawan bicara Anda
- **Perhatikan non verbal komunikasi.** Tidak semua komunikasi berbentuk verbal, komunikasi nonverbal juga terjadi. Kata-kata yang diucapkan tidak mengungkapkan seluruh arti

yang hendak disampaikan. Anda perlu mengenali segala bentuk komunikasi di luar bentuk verbal. Selain itu, perhatikan pula nada suara dan irama bicara, volume suara dan kecepatan bicara atau bergumam, ungkapan wajah, tampilan sosok tubuh, gerakan tangan, dan tarikan nafas. Semuanya "berbicara" pada Anda tentang perasaan yang lawan bicara Anda alami.

- **Tunjukkan bahwa Anda mendengarkan.** Berikan respons dengan menggunakan Bahasa tubuh seperti menangguk dan tersenyum. Pastikan Bahasa tubuh Anda terbuka dan tertarik dalam percakapan. Jangan lupa untuk memberikan lawan bicara Anda untuk berbicara lebih dengan memberikan komentar sederhana seperti : ya, begitu, dsb
- **Menguji pengertian.** Mendengarkan untuk mengerti orang lain itu sukar, karena berarti kita berusaha melihat dunia menurut sudut pandang pembicara. Untuk itu upaya 'mengulangi' pernyataan lawan bicara dengan kata-kata sendiri dapat menguji pengertian atau pemahaman kita agar tidak terjadi kesalahpahaman. Contoh: "Kalau tidak salah dengar, kamu menyatakan ..." atau "dengan kata lain, kamu mau mengatakan ..."

- **Jangan memotong atau menginterupsi pembicaraan.** Memotong pembicaraan dapat menyinggung lawan bicara dan membatasi Anda untuk mengerti arti sebenarnya dari maksud yang akan disampaikan oleh lawan bicara Anda. Oleh karena itu, biarkan lawan bicara Anda menyelesaikan kalimat-kalimat dan inti dari pesan yang ia sampaikan. Jangan memotong pembicaraan dengan menggunakan argumentasi yang melawan
- **Berikan respons dengan baik.** Berikan opini pribadi Anda secara baik dan menghormati pendapat lawan bicara Anda dan perlakukan lawan bicara Anda secara pantas

Mendengarkan aktif melatih kita untuk menghormati dan mengerti orang lain. Menjadi pendengar aktif memerlukan konsentrasi yang tidak sedikit dan juga tekad yang kuat. Mulailah belajar mendengarkan aktif sedikit demi sedikit untuk meningkatkan produktivitas di kantor dan juga meningkatkan kualitas hubungan dengan individu-individu lain.

Mendengarkan aktif merupakan sebuah proses yang kompleks, melibatkan semua panca indera dan bagian-bagian tubuh lain secara aktif sehingga pesan yang disampaikan menjadi bermakna.



FOTO : DOK. PRIBADI

ANDI NUGROHO SURYO KUNCORO
ALUMNI CORNELL UNIVERSITY

Velox et Exactus (et Quietes)

CEPAT, TEPAT (DAN TIDAK GADUH)

Menulis kolom ini, terus terang saya gembira namun pada saat yang sama, batin serasa digelayuti kegalauan. Salah sendiri, saya *non-konformis*, tidak mudah betah berada di bawah bayang-bayang tiga kolom Alumni di tiga edisi sebelumnya pada majalah yang pembaca budiman sedang masyuk baca ini. Masalahnya sepele, apa sebab? Di tiga edisi sebelumnya, ketiga penulis kolom alumni ini memakai Bahasa Inggris sebagai tajuknya. Dua edisi pertama, dua orang alumni beririsan dalam hal kesukaan mengagitasi pembaca untuk sudi hengkang dari zona nyaman. Sedangkan edisi ketiga adalah kolom dari Doktor Arifin, kawan berpikir yang sayangnya kami tidak (belum) ditakdirkan dalam satu Direktorat untuk mengawinkan model ekonomi makro saya dengan model *behavioral* beliau.

Tekanan batin kedua berkenaan dengan penggunaan kata ganti orang “saya” yang sulit dihindarkan dalam penulisan kolom ini. Terus terang, hanya ke “saya” an Chairil Anwar dalam “Aku” yang mampu merangsang saya untuk “menjadi” (*to be*) dalam istilah Fromm. Saya takut tidak akan semenarik Chairil dan membuat bosan pembaca yg budiman. Dalam 105 halaman *thesis* saya, pembaca tidak akan menemui kata “saya” atau “aku” meski dalam lembar *Acknowledgment* dan *Biography* sekalipun. Dilabeli *narcissist* atau sekedar terdengar seperti veteran atau pensiunan yang sulit menahan diri untuk mengulang-ulang menceritakan bab pencapaian-pencapaian hidupnya kala muda adalah *phobia* saya. Oleh karenanya saya berjanji, para pembaca yang budiman akan jarang menemukan “saya” dalam paragraf-paragraf berikutnya. Mendeklarasikan perasaan ini menyisakan saya 800 kata. Maka dari itu, saya akan cukupkan *small talk* dan mulai memakai *American style* dalam menyampaikan gagasan-gagasan besar (bukan sekedar trik *hacking life* di negeri seberang), *straightforward to the point*.

To be atau *being* adalah gagasan besar yang banyak mengubah hidup saya. *Being* merupakan modus eksistensi manusia menurut Erich Fromm yang saya kutip dari bukunya bertajuk ‘*To Have or To Be?*’ terbitan pertama tahun 1976. Buku itu pertama kali saya baca 14 tahun lalu sewaktu saya masih di STAN Jurangmangu, saya pinjam dari Kang Zezen (penulis *Bintang di Atas Al-Hambra*),

seorang aktivis kawakan ahli hukum internasional dan Islam yang sekarang sedang studi doktoral di UCLA. Hasil diskusi tentang isi buku itu telah banyak mempengaruhi keputusan-keputusan hidup saya termasuk untuk belajar ke luar negeri dan menemukan profesor sebijak Fromm (yang pada akhirnya saya temukan di kampus Ivy League, Cornell University).

Modus eksistensi manusia yang kedua menurut Fromm adalah *To Have*, yang merupakan sentral dari dorongan batin manusia untuk menumpuk-numpuk materi, kekuasaan, dan melakukan agresi. Turunan dari modus eksistensi ini adalah sifat keserakahhan (*greed*), kedengkian (*envy*), dan kekerasan (*violence*). Sebaliknya, modus *To Be* menurut pemahaman saya, merupakan dasar filosofi yang baik untuk mendorong revolusi sosioekonomi karena menawarkan *antithesis* dari modus eksistensi *To Have*, yakni berupa cinta kasih terhadap sesama, pencipta, dan lingkungan hidup, serta rasa gembira untuk hidup berbagi dan melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif yang membawa kebaikan untuk manusia dan alam raya. Sedikit banyak dari nilai-nilai tersebut telah dikandung oleh *Sustainable Development Goals* (SDG).

Keputusan untuk membentuk hidup dengan modus eksistensi yang pertama (*to be*) sudah bulat. Studi ke Cornell saya jadikan *means* (bukan *end*) untuk terbentur, terbentur, kemudian terbentuk. Oleh karena itu, dari awal perjuangan mengejar studi luar negeri, niat sudah saya diluruskan untuk semata-mata menemukan *wahyu tirtaperwitasari*¹⁾ dan untuk menghasilkan *thesis* yang dapat memperkaya khasanah perekonomian nasional dan kebijakan fiskal di Indonesia, terutama yang bermanfaat untuk masyarakat dan Ketahanan Nasional kita.

PADI TUMBUH TAK BERISIK

Semua itu tentu ingin saya capai secara cepat (*velox*), tepat (*exactus*), namun tidak berisik (*quietes*). Namun demikian, sedikit yang tahu bahwa studi saya ke Cornell University adalah percobaan mendapatkan beasiswa yang ke delapan kalinya. Mulai dari SPIRIT, Fulbright, Stuned, Chevening (karena terdorong untuk studi ke London School of Economics (LSE)), USAID, dan LPDP telah saya coba, beberapa gagal, dan dua berhasil. Sekalipun berhasil menjadi *awardee* USAID, saya gagal berangkat ke Amerika karena permasalahan surat tugas belajar dari instansi tempat bekerja.



FOTO : DOK. PRIBADI

¹⁾ *Wahyu tirtaperwitasari* adalah ilmu, cahaya, atau kebijaksanaan yang dicari-cari oleh Bima dalam kisah pewayangan favorit saya berjudul *Dewa Ruci*. Saya dengarkan pertama kali sewaktu saya masih sekolah dasar di Bantul melalui siaran radio dan kaset menurut versi yang dibawakan oleh Ki Narto Sabdo.



FOTO : DOK. PRIBADI

Beasiswa FETA 1 (*Financial Education and Training Agency* yang pertama) adalah percobaan ke delapan yang berhasil tuntas dan tidak gaduh. Sedikit kawan-kawan yang tahu perihal saya mendaftar ke banyak kampus di Amerika Serikat dan berhasil mendapat *Letter of Acceptance*, di antaranya Duke University, University of Southern California (USC), SIPA at Columbia University, State University of New York (SUNY) at Buffalo, University of Denver, dan Cornell University. Wawancara via *skype* dengan *academic advisor* (*professor* di Cornell University) saya lakukan jam 2 dini hari waktu Indonesia bagian barat (atau pukul 2 waktu New York). Waktu yang sebenarnya aneh untuk mengenakan batik *endek* dari Bali, berdiri di depan buku-buku di *basement* perpustakaan PPSDM yang konon menyeramkan, dan memakai minyak rambut super *kinclong*. Namun, wawancara berjalan *smooth* dan berhasil mengesankan profesor pembimbing akademik (yang ternyata *professor legend* di College of Human Ecology di Cornell University). Kampus-kampus lain di mana kawan-kawan saya mendaftar tidak memerlukan wawancara untuk pendaftaran. Namun, saya justru punya *good feeling* terhadap kampus yang lebih *ribet* dalam hal pendaftaran mahasiswa.

Benar dugaan, rupanya kala itu saya menjadi kandidat Master di Cornell

Institute for Public Affairs satu-satunya dari dan se-Asia Tenggara (ASEAN). Situasi ini mendorong saya untuk lebih *perform* secara akademik dan riset. Oleh karena itu, saya banyak menulis *paper* tentang U.S., *politic*, *welfare policies*, dan *publicly held debt* di Amerika Serikat dalam lintas sejarah dan lintas konstelasi politik di U.S. Congress, Senate, dan Presidency sejak Presiden Humphrey (1930-an) sampai dengan Presiden Trump (2017). Gelar kehormatan dan keanggotaan *Pi Alpha Alpha* (Chapter Cornell University) dalam pencapaian akademik dan *leadership* berhasil saya sabet pada waktu wisuda. Bersama profesor, Johnson Business School, dan South East Asia Program, kami membuat *speaker event* dengan mendatangkan Gita Wirjawan (Mantan Menteri Perdagangan) ke Cornell University untuk berbicara soal tantangan Asia Tenggara di pusan *Global Value Chain*. Acara tersebut dihadiri profesor terkemuka Erik Thorbecke.

Namun, yang menjadi karya *biblikal* saya adalah thesis sepanjang 105 halaman bertajuk *Macroeconomic and Socioeconomic Impacts of Tax Amnesty Policy in Indonesia: An Economy-Wide Approach* yang dibimbing langsung oleh profesor Iwan Jaya Azis, ekonom terkemuka dan sekaligus guru dari Sri Mulyani (Menkeu), Chatib Basri (mantan Menkeu), Bambang Brodjonegoro (Kepala Bappenas), Suahasil

Nazara (Kepala BKF), dan Rhenald Khasali. *Thesis* dengan model ekonomi yang mengandung 1.295 variabel dan 88 persamaan matematika ini cukup berat untuk dikerjakan, apalagi jika modus hidup seseorang sekedar *To Have* (sekedar lulus berijazah dan bergelar Master). Model/teknologi dengan variabel sebanyak itu, biasa dikerjakan oleh calon Ph.D di jurusan Ekonomi atau *Regional Science*. Gayung bersambut, tantangan Prof. Iwan saya terima. Saya kerjakan *final project* itu mulai dari tahun pertama semester kedua (dari total 4 semester) secara *velox*, *exactus*, dan tentunya *et quietes*. Tantangan berikutnya adalah membuat teknologi yang saya bawa ini masuk ke dalam radar rezim (pembuat kebijakan) dan yang paling utama agar dapat bermanfaat untuk sebesar-besarnya kemakmuran bangsa dan tumpah darah Indonesia.

“Keputusan untuk membentuk hidup dengan modus eksistensi yang pertama (to be) sudah bulat. Studi ke Cornell saya jadikan means (bukan ends) untuk terbentur, terbentur, kemudian terbentuk.”

Membuat Tab Menu Sendiri pada Microsoft Office

Microsoft Office memanjakan penggunaannya dengan menyediakan sederetan fitur yang dikemas dalam bentuk tab menu. Secara *default*, aplikasi ini mempunyai *tab menu* yang dapat digunakan. Pengguna dapat memilih fitur-fitur yang akan dipakai sesuai dengan kebutuhannya. Tapi setidaknya pengguna harus mengetahui terlebih dahulu lokasi fitur pada *tab menu* mana yang akan dipakai.

Tips and trik kali ini akan membahas bagaimana cara membuat *tab menu* sendiri di Microsoft Office, khususnya Microsoft

- Kelebihan *Customize*

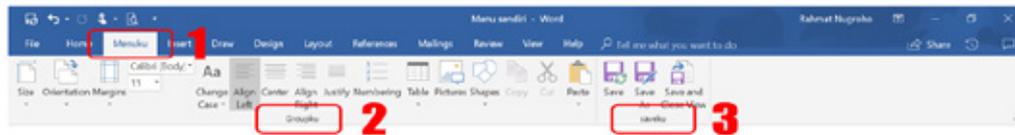
Adapun kelebihan dari *tab menu* yang kita buat sendiri ialah kemudahan dalam menggunakan fitur yang sering dipakai. Sehingga kita dapat membuat dokumen menjadi lebih cepat tanpa perlu mencari-cari terlebih dahulu fitur yang diperlukan. Selain itu kita juga dapat menyimpan fitur-fitur lain yang tidak terdapat pada *tab menu* default.

1. *Tab Menu* dan *Group Menu* pada Microsoft Word

lihat ada *tab menu* dengan nama *Menuku* (Gambar 2 angka 1). *Menuku* sendiri terdiri dari dua *group menu*, yaitu *Groupku* dan *saveku* (Gambar 2 angka 2 dan 3). *Groupku* terdiri dari fitur-fitur pilihan yang diantaranya adalah: *Size*, *Orientation*, *Margins*, sampai dengan *Paste*. Sedangkan *group menu* *saveku* berisi fitur *Save*, *Save As*, dan *Save and Close View*.

3. Langkah-langkah Pembuatan

Untuk dapat membuat *tab menu* seperti pada Gambar 2, kita dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut:



Keterangan Nomor:
1. *Tab Menu* - *Menuku*
2. *Group Menu* - *Groupku*
3. *Group Menu* - *saveku*

Gambar 1. *Tab Menu* dan *Group Menu* Microsoft Word

Word. Namun yang menjadi pertanyaan adalah seberapa perlukah kita membuat *tab menu* sendiri? Untuk menjawab pertanyaan tersebut mungkin ada baiknya kita melihat kelemahan dari *tab menu* default dan kelebihan dari *tab menu* buatan sendiri (*customize*).

- Kelemahan *Default*

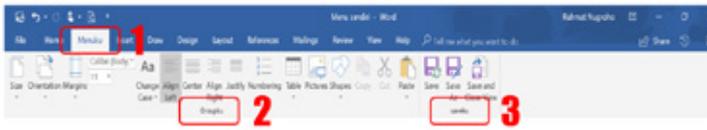
Salah satu kelemahan dari *tab menu* default adalah kita harus tahu tata letak fitur-fitur pada *group* yang akan digunakan. Bagi seseorang yang sudah familiar dan sering menggunakan, hal tersebut tidak menjadi masalah. Namun bagi yang kurang familiar, hal tersebut malah dapat memperlambat proses pembuatan dokumen yang diinginkan.

Gambar 1 menunjukkan contoh dari tampilan *tab menu* dan *group menu* default pada aplikasi Microsoft Word. *Tab menu* default dari aplikasi ini yaitu: *Home*, *Insert*, *Design*, *Layout*, *References*, *Mailings*, *Review*, dan *View*. Sedangkan fitur *Paste*, *Cut*, *Copy*, dan *Format Painter* merupakan salah satu contoh *group menu* pada *tab menu* *Home*. Simpulannya, secara aplikasi kita diberi fasilitas untuk membuat sendiri *tab menu* serta menentukan fitur-fitur pada *group menu* itu sendiri.

2. *Example*

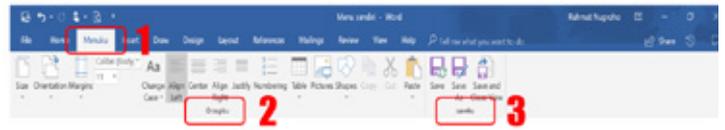
Gambar 2 merupakan salah satu implementasi dari pembuatan *tab menu* sendiri. Pada gambar tersebut dapat kita

- Letakkan posisi cursor pada salah satu nama *tab menu*. Klik kanan *mouse* pada posisi tersebut, kemudian pilih *Customize the Ribbon...* pada pilihan yang muncul Gambar 3.
- Selanjutnya akan muncul jendela *Word Options* (Gambar 4 angka 1). Pada jendela tersebut (*Customize Ribbon* Gambar 4 angka 2) akan terdapat dua bagian yaitu bagian *Choose command from* (Gambar 4 angka 3) dan *Customize the Ribbon* (Gambar 4 angka 4);
- Pada bagian *Customize the Ribbon*, klik *tab menu* pada salah satu



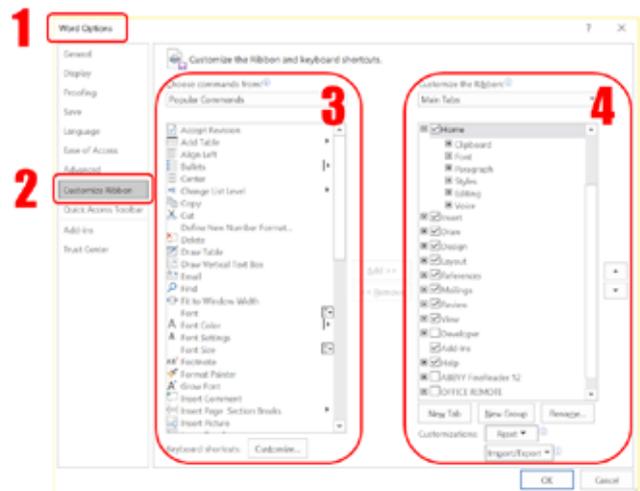
Keterangan Nomor:
 1. Tab Menu - Menuku
 2. Group Menu - Groupku
 3. Group Menu - saveku

Gambar 2. Contoh Tab Menu Customize



Keterangan Nomor:
 1. Tab Menu - Menuku
 2. Group Menu - Groupku
 3. Group Menu - saveku

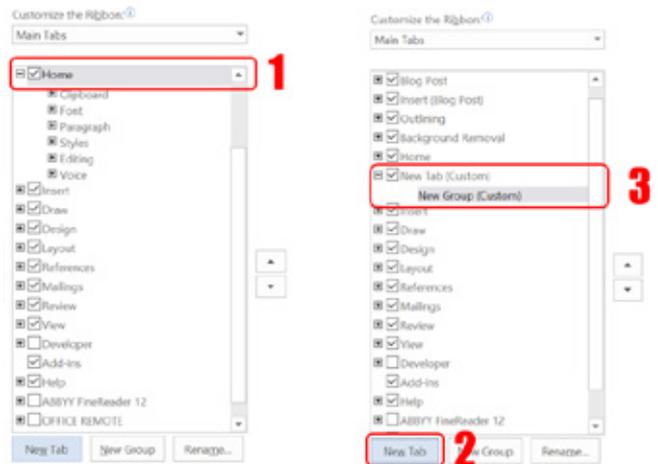
Gambar 3. Pilihan Customize The Ribbon



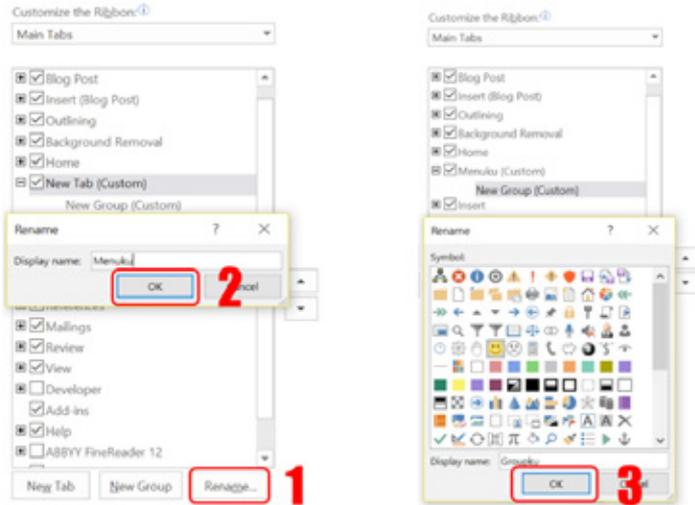
Gambar 4. Jendela Word Options

Main Tabs (dalam contoh ini tab menu Home pada Gambar 5 angka 1). Kemudian pilihan New Tab (Gambar 5 angka 2) yang mana secara otomatis akan muncul tab menu beserta group baru custom (Gambar 5 angka 3). Klik pilihan Rename (Gambar 6 angka 1) pada New Tab (Custom), kemudian isi nama tab menu baru kemudian klik OK (Gambar 6 angka 2). Berlaku juga untuk mengubah nama group menu dengan meng-klik pilihan Rename. Pilih simbol dan isi nama untuk group menu tersebut kemudian klik OK (Gambar 6 angka 3).

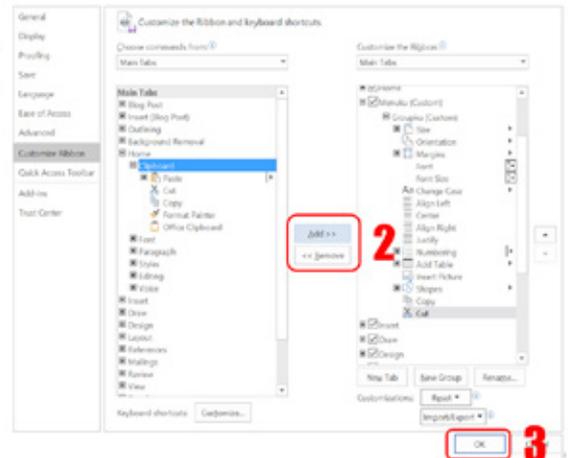
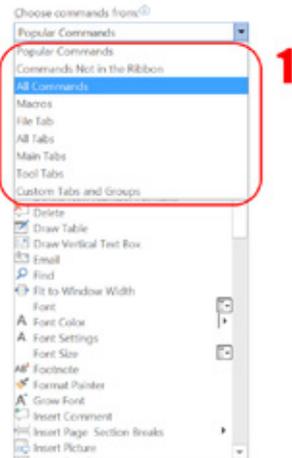
- d. Pada bagi Choose Command, klik drop down list dan pilih salah satu commands yang muncul (Gambar 7 angka 1). Pilih fitur-fitur yang akan dimasukkan pada group menu yang telah dibuat dengan meng-klik tombol Add (Gambar 7 angka 2). Misalnya pada contoh ini kita memasukkan fitur Cut pada group menu dengan nama Groupku. Klik tombol OK untuk menyimpan pembuatan tab menu yang telah kita buat (Gambar 7 angka 3).



Gambar 5. Pembuatan Tab Menu Baru



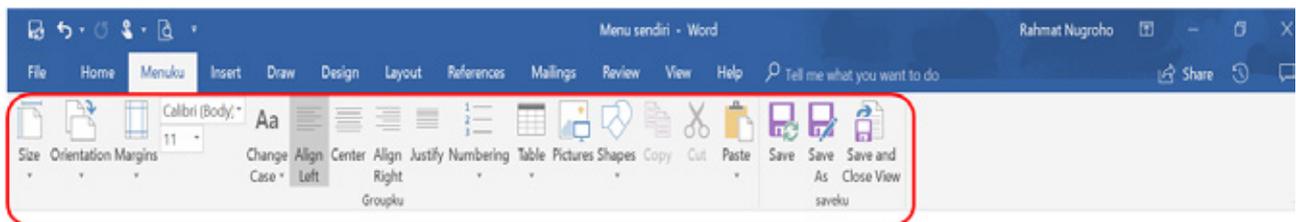
Gambar 6. Penamaan Tab dan Menu Grup Baru



Gambar 7. Tahap Akhir Pembuatan Tab Menu Baru

4. Hasil

Selamat, kita telah berhasil membuat *tab menu* sendiri pada Microsoft Word. Langkah-langkah pada tips and trik ini juga dapat dilakukan pada aplikasi seperti Microsoft Excel, PowerPoint, dan produk Microsoft Office yang lainnya.



Gambar 8. Tab Menu Baru yang Telah Dibuat

FITRIA SRI WULANDARI

ARC-EN-CIEL

/ar.kã.sjɛl/ | PELANGI

Suatu ketika warna-warna di dunia mulai bertengkar. Semua merasa yang paling hebat, paling baik, paling penting, paling berguna, paling dibutuhkan, dan paling segala-galanya. Warna hijau yang pertama membangga-banggakan dirinya, si hijau pun berkata: "Hei teman-teman semua, tahu nggak warna apa yang paling hebat, paling penting, dan terbaik? Ya aku dong, aku jelas yang paling penting, paling hebat, dan terbaik. Hijau itu tanda kehidupan dan harapan, lambang kesuburan, dan sumber kehidupan. Coba tengok di sekitar kalian, kalian semua pasti lihat aku, aku yang paling banyak memenuhi dunia."

Kemudian warna biru datang dan menyela si hijau dan berkata: "Apanya yang paling hebat, penting, dan baik? Kamu tahu nggak, coba lihat langit dan air di laut, itu semua warna aku. Tanpa aku, tanpa damaiku itu, kalian bukan apa-apa. Jadi, kalian jangan merasa paling penting deh, aku itu yang paling penting."

Melihat itu, warna kuning datang dan kemudian berkata sambil tertawa:

Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan citra-Nya, memiliki ciri satu dengan yang lain untuk dapat saling melengkapi dan bukan menjadi saling mendominasi.

"Hahahaha, kalian ini kenapa pada serius amat sih? Eh, lo semua liat gue, warna gue kuning kan, lo samaiin deh gue sama matahari, matahari itu warnanya kuning kan, bulan juga kuning, bintang-bintang terangnya juga kuning, dan tiap kali kalian liat gue, liat deh sama kan kayak warna bunga matahari, bunga matahari juga kuning, semua dunia pasti tersenyum liat gue, *kalo* tanpa gue dunia ini nggak akan ada asik-asiknya, nggak ada indah-indahnya karena gue adalah pembawa kehangatan, keceriaan, kegembiraan, dan kesenangan yang abadi. Jadi, kalian semua nggak usah ke-GR-an *deh*, gue yang paling dibutuhkan, paling penting daripada kalian semua."

Warna hijau, biru, dan kuning begitu saling menyombongkan diri mereka sehingga membuat warna jingga pun tidak mampu menahan ingin ikut berbicara. Jingga pun merasa dialah warna yang terbaik daripada ketiga warna lainnya. "Hai hijau, biru, kuning, kalian itu harus tahu bahwa aku warna yang paling penting. Aku itu warna kesehatan dan kekuatan. Aku memang jarang terlihat,

tetapi kalau sekiranya aku muncul, aku itu pasti dibutuhkan semua orang, paling berharga diantara yang lain. Aku dibutuhkan manusia setiap hari. Lihat saja, wortel, labu, jeruk, manga, dan pepaya, semua itu warna apa coba, ya jelas-jelas warna aku kan dan semua itu membuat semua manusia sehat. Manusia kalau tidak sehat, mana mungkin bisa merasakan kebahagiaan. Matahari itu warnanya aku bukan kamu kuning. Jadi, semua orang pasti suka sama aku, bukan sama kalian, tidak ada manusia yang memikirkan kalian, ingat itu.”

Melihat keangkuhan warna jingga, warna merah pun tidak bisa lagi menahan diamnya. Kemudian si merah menghampiri keempat warna itu, ia berteriak menyuruh warna-warna yang menyombongkan diri mereka masing-masing untuk diam. ”Diamlah kalian semua, akulah penguasa-penguasa kalian semua. Aku adalah darah, darah kehidupan. Aku adalah warna kebahagiaan dan keberanian. Aku semangat yang menggelora, tanpaku bumi akan kosong seperti bulan. Aku adalah hasrat dan cinta. Semua orang di dunia membutuhkan aku. Kalian pikir saja, tanpaku apa bisa manusia hidup? Aku itu yang paling dibutuhkan dan bukan kalian-kalian itu.”

Warna ungu pun berdiri tegak diantara mereka. Dia merasa sangat tinggi dari yang lain. Dia pun berbicara penuh wibawa: ”Sudah-sudah, kalian itu semua lihat aku, aku itu warna kerajaan dan kekuasaan. Raja, kepala suku, semua pemimpin selalu memilih aku karena aku itu tanda otoritas dan kebijaksanaan, aku warna keagungan. Orang-orang tidak ada yang mempertanyakan hal itu, mereka hanya mendengar aku dan patuh terhadap aku.”

Semua warna-warna yang ada saling bertengkar, berada kekuatan masing-masing. Melihat itu semua, warna nila pun ikut berbicara. Nila pun berbicara dengan tenang dan penuh keyakinan: ”Oalah, kalian itu berpikirlah tentang aku. Aku ini warna keheningan dan ketenteraman. Kalian memang susah

melihat aku, tapi kalau tanpaku kalian ini cuman jadi warna yang biasa-biasa saja, tidak ada artinya. Aku ini mewakili pemikiran dan refleksi, senja, dan air yang dalam. Aku ini sumber ketenangan. Kalian itu membutuhkan aku untuk keseimbangan, doa, dan kedamaian. Ya kalau begitu, aku jelas yang sangat dibutuhkan dan bukan kalian.”

Demikianlah semua warna saling bertengkar. Mereka tidak henti-hentinya saling membanggakan diri mereka masing-masing, meyakinkan kehebatan mereka, saling menunjukkan kehebatan dan kesombongannya. Tiba-tiba terdengar suara guruh yang memekakkan telinga. Warna-warna itu meringkuk ketakutan dan terlihat lemah satu sama lain. Kemudian hujan pun turun, turun begitu derasnya. Warna-warna pun saling mendekati satu dengan yang lain karena rasa takut dan kedinginan. Hujan pun berkata: ”Merah, Jingga, Kuning, Hijau, Biru, Nila, dan Ungu, kalian warna-warna yang sombong, kalian saling bertengkar, kalian masing-masing ingin mendominasi yang lain. Tidakkah kalian sadar, kalian masing-masing diciptakan Tuhan itu khusus, unik, dan berbeda. Kalian itu saling membutuhkan, kalian harus saling melengkapi. Sekarang bergandengan tanganlah dan datang kepadaku.”

Warna-warna itu pun bersatu dan bergandeng tangan. Hujan pun melanjutkan perkataannya: ”Nah, mulai sekarang dan sampai selamanya, ketika hujan turun, kalian masing-masing akan terentang sepanjang langit dalam posisi menunduk sebagai pengingat bahwa kalian dapat hidup dalam damai. Kalian diberi nama pelangi. Pelangi adalah tanda harapan untuk menghargai satu sama lain. Kita masih membutuhkan satu sama lain untuk membuat dunia ini menjadi indah dengan aneka warna.”

Akhirnya warna-warna itu sadar bahwa diantara mereka tidak ada yang paling penting, paling hebat, paling berguna, dan paling segala-galanya, yang terpenting adalah menghargai, itu kuncinya.

Cerita di atas terinspirasi dari sebuah pesan yang pernah Penulis dengar mengenai pentingnya kita untuk dapat saling menghargai dengan keunikan kita masing-masing dalam hal apa pun itu. Cerita di atas mengajak kita untuk merenungkan bahwa kita adalah makhluk sosial dan pentingnya saling menghargai.

Perbedaan merupakan hal yang pasti. Perbedaan seharusnya bisa memberikan manfaat dan memperkaya diri kita. Hargailah perbedaan yang ada di sekitar kita karena perbedaan merupakan kekayaan yang kita miliki. Rasakan betapa baiknya Tuhan. Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan citra-Nya, memiliki ciri satu dengan yang lain untuk dapat saling melengkapi dan bukan menjadi saling mendominasi. Perbedaan dijadikan Tuhan indah dengan adanya kebersamaan yang mendamaikan. Janganlah membuat perbedaan itu merusak kedamaian. Perbedaan bisa membuat kita lebih menghargai hidup. Penuhilah hidup kita setiap hari dengan semangat kebersamaan. Begitupun dalam kehidupan berorganisasi dan dunia kerja. Selayaknya warna, masing-masing memiliki keunikan, kemampuan, keterampilan, dan kompetensinya sendiri. Di antara kita semua tidak ada yang ”paling” dalam hal apapun. Kita bekerja secara berkelompok, saling melengkapi dan saling mendukung satu sama lain untuk mencapai tujuan organisasi.

ARIMBI PUTRI

UDANG VITAMIN C = RACUN (?)⁺

Dugaan sejumlah pakar bahwa merebaknya anggapan tersebut disebabkan adanya pemikiran tentang kandungan arsen pada makanan laut.

Para penggemar hidangan laut sempat dikhawatirkan dengan mitos kesehatan yang merebak dalam dua dekade terakhir. Penikmat kuliner dan masyarakat pada umumnya takut memesan es jeruk selepas menyantap hidangan laut karena mitosnya bisa menyebabkan keracunan, bahkan kematian. Eits, jangan panik dulu. Semua mitos pasti ada penjelasan ilmiahnya. Ingin tahu fakta sebenarnya seperti apa? Simak pemaparannya di bawah ini yang dihimpun dari berbagai sumber.

UDANG MENGANDUNG ARSEN

Masih ingat dengan penyebab kematian tokoh hak asasi manusia (HAM), Munir, pada 2004 lalu? Diketahui, Munir tewas diracun arsenik di dalam pesawat saat penerbangannya ke Amsterdam. Nah, mitos kesehatan secara turun temurun menyebutkan bahwa perpaduan udang dan vitamin C dapat menimbulkan zat kimia mematikan yang membunuh aktivis HAM tersebut.

Dugaan sejumlah pakar bahwa merebaknya anggapan tersebut di atas disebabkan adanya pemikiran tentang kandungan arsen pada makanan laut. Kandungan arsen tersebut diduga memberikan reaksi saat bercampur dengan vitamin C dan berujung pada sejumlah masalah kesehatan serius.



Faktanya, udang dan makanan laut lainnya memang mengandung senyawa kimia arsen yang berasal dari zat-zat kimia organik di dalam laut. Senyawa arsen jika masuk ke dalam tubuh manusia dalam kadar tertentu memang dapat menimbulkan reaksi keracunan, seperti mual, muntah, nyeri perut, diare, kejang-kejang, dan bahkan dapat juga menyebabkan kematian. Tapi, jika dikonsumsi dalam kadar berlebihan.

Air laut ternyata hanya memiliki kandungan 1-2 mikrogram arsen per liternya. Untuk menyebabkan keracunan atau kematian, setidaknya kandungan yang masuk dalam tubuh sekitar 70-200 miligram arsen. Berdasarkan standar nasional di Cina, dalam satu kilogram udang hanya mengandung arsenik anorganik sebesar 0,5 miligram.

Dalam perhitungan tersebut, setidaknya kita akan keracunan jika memakan sekitar 100 kilogram udang. Jika semua senyawa arsenik anorganik dalam udang diubah menjadi arsenik trioksida, seseorang akan keracunan hingga menyebabkan kematian pada kadar 150 kilogram udang dalam sekali makan.

UDANG DAN VITAMIN C

Berdasarkan informasi yang berhasil penulis himpun, belum ada satu jurnal pun yang menyebutkan efek negatif dari kombinasi makanan laut dan vitamin C, terlebih menghasilkan senyawa arsenik. Pun dengan kasus yang sampai menyebabkan kematian. Kenyataannya, vitamin C sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk menaikkan kadar arsen ketika bercampur dengan makanan laut.

Dilansir dari klikdokter, peneliti di bidang kesehatan telah melakukan penelitian antara kombinasi vitamin C dan senyawa arsenik. Uniknya, peneliti tersebut justru menemukan manfaat dari kombinasi vitamin C dan arsenik trioksida (As_2O_3), salah satunya untuk meningkatkan efektivitas obat kanker.

Di sisi lain, makanan laut selama ini dimasak dan dihidangkan justru berdampingan dengan bahan masakan yang mengandung vitamin C tinggi, seperti lemon, jeruk, jeruk nipis, dan cabai. Logikanya, jika perpaduan makanan laut dan vitamin C dapat menimbulkan efek keracunan, seharusnya sudah banyak kasus yang menyeruak, namun kenyataannya sebaliknya. Sehingga, klaim vitamin C yang mampu mengubah makanan menjadi beracun bahkan menyebabkan kematian tidak didukung dengan fakta yang jelas dan penelitian yang valid.

Para pakar kesehatan bahkan menyarankan manusia mengonsumsi makanan laut yang mengandung protein tinggi dan kaya manfaat, serta mengonsumsi makanan atau minuman yang mengandung vitamin C karena berfungsi sebagai antioksidan dan meningkatkan daya tahan tubuh.

Jadi, tak perlu khawatir mengonsumsi vitamin C dan makanan laut secara bersamaan. Seluruh mitos yang kita dengar dan ketahui pasti ada penjelasan logis dan ilmiahnya. Namun ada baiknya juga mengikuti pepatah bahwa segala yang berlebihan itu tidak baik. Sehingga, mengonsumsi makanan dalam batas wajar adalah pilihan yang bijak. Selamat menikmati nikmatnya hidangan laut dan baiknya manfaat vitamin C!

NI KOMANG YOSSY TRISNA SUKAWATI

Belanja Oleh-oleh Murah di Pasar Seni Kumbasari



FOTO : NI KOMANG YOSSY TRISNA SUKAWATI

Sebagai salah satu destinasi wisata di Indonesia, Pulau Bali selalu memiliki sisi-sisi menarik yang dapat dikunjungi. Kesenian, budaya, dan kekayaan alam yang dimiliki seakan-akan memanggil para wisatawan untuk selalu berkunjung. Bahkan terkadang dirasa tidak cukup satu kali. Selalu ada hal baru yang bisa dieksplorasi dan dinikmati di Pulau Seribu Pura ini.

Selain kesenian, budaya, dan keindahan alam yang ditawarkan, hal menarik lainnya adalah *handy craft* (kerajinan tangan). Hasil karya para seniman-seniman di Bali ini selalu menjadi incaran para wisatawan yang sedang berkunjung. Kerajinan tangan ini bisa untuk dikoleksi atau dijadikan sebagai buah tangan bagi handai taulan.



Salah satu sentra *handycraft* yang ada di tengah-tengah kota Denpasar adalah Pasar Seni Kumbasari. Bagi para wisatawan yang sedang berkunjung di kota Denpasar dapat mengunjungi Pasar Seni Kumbasari yang berada di JL. Gajah Mada, Pemecutan - Denpasar, sekitar 10 menit dari Lapangan Bajera Sandhi Renon. Karena lokasi kota Denpasar jarang untuk dilewati angkutan umum, para wisatawan dapat mengunjungi lokasi dengan taksi maupun ojek online.

Pasar Seni Kumbasari ini merupakan salah satu pasar tradisional yang ada di kota Denpasar. Sayangnya, kini mulai ditinggalkan, kalah dengan kerasnya gempuran toko-toko oleh-oleh modern yang ada di kota Denpasar.



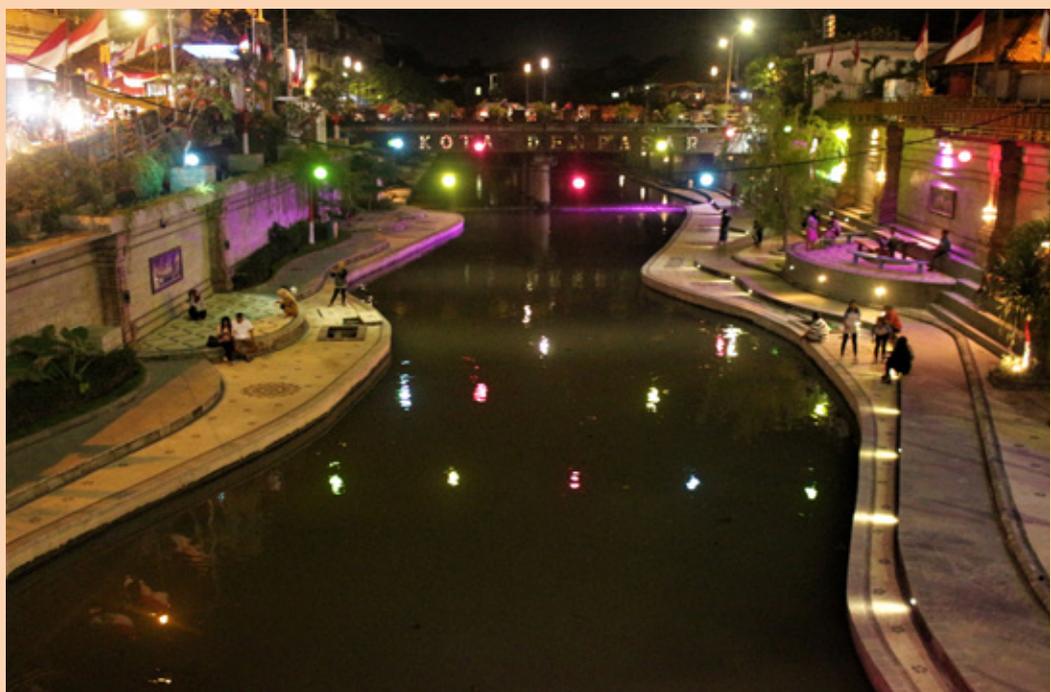
FOTO : NI KOMANG YOSSY TRISNA SUKAWATI

Di Pasar Seni Kumbasari terdapat banyak kios yang menjajakan produk *handy craft* seperti patung kayu, ukiran, lukisan, dompet, tas, *dream catcher*, pernak-pernik hiasan rumah lainnya, serta baju-baju khas Bali yang dapat dijadikan cinderamata atau oleh-oleh. Kisaran harga yang ditawarkan relatif lebih murah bila dibandingkan dengan pusat oleh-oleh lainnya.

Sedikit tips bagi pengunjung yang akan berbelanja di pasar ini, sebaiknya menawar dari harga yang ditawarkan oleh penjual, sehingga dapat memperoleh barang yang menarik namun dengan harga yang terjangkau. Seringkali harga yang ditawarkan pada pasar seni ini 50% lebih murah dibandingkan dengan tempat penjualan oleh-oleh lainnya. Para pengunjung tidak perlu lagi merasa khawatir dengan *budget* minim yang dimiliki untuk membeli oleh-oleh.

Di pasar ini pengunjung juga dapat membeli beberapa jenis buah-buahan khas Pulau Bali yang dapat dijadikan oleh-oleh, seperti salak gula pasir, salak bali, jeruk kintamani, dan jeruk bali. Harga yang ditawarkan relatif terjangkau, bergantung dengan musim buah tersebut. Contohnya salak, apabila sedang musim akan dibandrol harga Rp.30.000-/kg untuk salak gula pasir dan Rp.15.000-/kg untuk salak bali. Sedangkan untuk jeruk pada berkisar Rp. 10.000,-/kg s.d. Rp. 15.000,-/kg.

Tidak hanya menawarkan oleh-oleh, untuk menarik para wisatawan lokal dan mancanegara, Pemerintah Kota Denpasar telah merombak sungai yang ada di pinggir Pasar Seni Kumbasari menjadi lokasi rekreasi. Pada bantaran sungai telah dibangun taman bunga dan tempat-tempat untuk para wisatawan bersantai dan menikmati pemandangan maupun berswafoto. Lokasi ini menjadi daya tarik bagi para pengunjung karena sungai ini dikatakan menyerupai sungai



Cheonggyecheon yang ada di kota Seoul, Korea Selatan. Pada malam hari sungai ini akan dihiasi lampu-lampu taman, sehingga semakin menarik.

Jadi tidak perlu diragukan lagi untuk para wisatawan yang sedang berkunjung di kota Denpasar untuk berkunjung ke Pasar Kumbasari. Selain dapat membeli oleh-oleh dengan harga terjangkau, Anda juga dapat melakukan swafoto di sungai "*Cheonggyecheon*" nya Bali.

FOTO : NI KOMANG YOSSY TRISNA SUKAWATI



ARDES M. Y. SITANGGANG

INDONESIA ETC.

- Exploring The Improbable Nation -

PENGARANG : ELIZABETH PISANI
 PENERBIT : LONTAR FOUNDATION
 JUMLAH HALAMAN : 396
 TAHUN TERBIT : 2014

Indonesia sudah diteliti dengan detail oleh akademisi dari berbagai disiplin ilmu, akan tetapi jarang sekali ada buku yang mengupas Indonesia dengan bahasa populer dan menarik untuk dibaca. Buku *Indonesia Etc. Exploring the Improbable Nation* karangan Elizabeth Pisani merupakan salah satu buku yang menjawab hal tersebut. Ia adalah seorang jurnalis Reuters yang pernah diminta militer untuk meninggalkan Indonesia tahun 1991, lalu kembali ke Indonesia saat reformasi sebagai seorang epidemiolog. Kali itu ia bertugas untuk membantu Kementerian Kesehatan memetakan penyebaran HIV. Selama dua tahun, 2011-2012, Pisani berkeliling Nusantara dan setiap pengalaman yang dia dapatkan dituangkan dalam buku ini. Sebagian besar mengira hal itu adalah fiksi, akan tetapi nyata terjadi di Indonesia.

Bab demi bab buku ini berisi kisah yang mungkin lucu tetapi memberi gambaran yang membangun mozaik Indonesia masa kini secara keseluruhan.

Buku ini dibuka dengan pengalaman Pisani saat ia kembali ke Sumba pada tahun 2011, menemui ibu-ibu yang sudah pernah dia temui sebelumnya. Ia merasa banyak yang berubah, akan tetapi masih banyak juga yang belum berubah, terutama dalam hal “adat”. “Adat is adat. *What can you do?*” ungkapnya. Adat sangat sulit diterjemahkan ke dalam bahasa modern, bahkan dari sisi ekonomi dan pendidikan. Misalnya berupa besar keuntungan yang mereka dapat setelah “jual” anak/saudara perempuan dalam adat Sumba (pernikahan). Tidak ada jawaban yang sederhana dalam adat tersebut yang Pisani dapatkan.

Bab demi bab buku ini berisi kisah yang mungkin lucu tetapi memberi gambaran yang membangun mozaik Indonesia masa kini secara keseluruhan. Perjalanan yang dilakukan untuk mendapatkan “benang merah” bagaimana Indonesia yang beragam bisa bersatu. Akan tetapi, terdapat dua hal yang selalu tersirat dalam setiap perjalanan dan cerita dari Pisani, yaitu suara wanita kuat dan diperhatikan, dan yang kedua adalah desentralisasi, yang terjadi dimana-mana dan seharusnya memberikan dampak positif kepada masyarakat.

Pisani mempunyai kelebihan dalam perjalanannya, yaitu posisinya sebagai seorang wanita asing. Posisi tersebut menguntungkan bagi Pisani karena aturan yang memisahkan wanita dalam adat tidak berlaku baginya, sehingga ia bisa ikut dalam acara adat maupun berdiskusi dengan para laki-laki. Akan tetapi, selayaknya orang biasa, Pisani juga menemui dan tidak menyukai apa yang dia temui. Berandalan, birokrasi yang berbelit-belit, dan kondisi lainnya

yang bisa kita alami, membuat Pisani kesal, apalagi dalam menghadapi orang “mediocre”, kurang berpendidikan, pemalas, dan lain-lain.

Keberagaman Indonesia yang didapat juga tidak hanya dari segi geografi dan budaya, sekelompok orang berbeda, menjalani hidup yang berbeda juga, dalam waktu yang bersamaan. Dalam satu lokasi, orang-orang hidup sederhana sebagaimana kehidupan seperti leluhur mereka, bertetangga dengan itu, petani hidup dengan mengendarai motor ke ladangnya, dan merekam ritual pengorbanan dengan ponselnya. Dalam keberagaman ini, secara mengejutkan terdapat satu kesatuan, yang menyatukan masyarakat yang tidak bisa terlihat dari satu kacamata disiplin ilmu. Sebab, kacamata yang dilakukan hanya fokus ke Jakarta, ataupun Bali yang dikunjungi oleh wisatawan.

Buku *Indonesia Etc.* sangat menarik untuk dibaca bagi kita, bagaimana tulisan yang ditulis oleh orang asing yang mempunyai sudut pandang yang berbeda dari pandangan kita. Akan tetapi, tulisan tersebut menggambarkan keberagaman bangsa kita dan memberikan pandangan baru atas kebinekaan bangsa ini. Dan membuat kita menghargai dan menyadari bahwa Indonesia kaya akan keberagaman, akan tetapi keberagaman itu membentuk suatu kesatuan yaitu Indonesia.

FOTO OLEH BALAI DIKLAT KEUANGAN PALEMBANG

Palembang

MEMPERCANTIK DIRI MENYAMBU *ASIAN GAMES 2018*



STASIUN LRT BANDARA PALEMBANG

Suasana di Stasiun Bandara, LRT Palembang, sarana angkutan yang dipersiapkan khusus untuk kenyamanan transportasi kontingen dan supporter Asian Games ke-18 Jakarta-Palembang 2018.

3 MASKOT ASIAN GAMES 2018

Bhin Bhin, Atung dan Kaka; tiga maskot Asian Games 2018 personifikasi semboyan persatuan Bhinneka Tunggal Ika, akan menyambut kedatangan kontingen negara-negara peserta di depan kantor INASGOC, yang pada hari H pelaksanaan akan menjadi pusat koordinasi tenaga medis.



FOTO : JENI WARDIN



TRIBUN PENONTON ARENA DAYUNG & KANOE

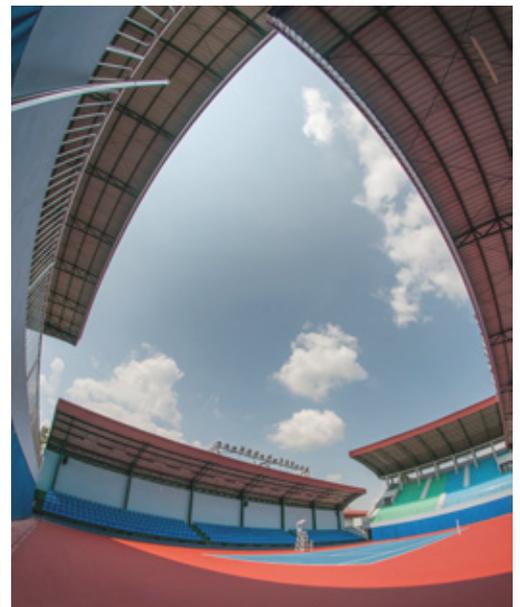
Para atlet yang bertanding di salah satu *venue* di area Jakabaring *Sport City* ini menyumbangkan lima medali untuk Indonesia, yang terdiri atas satu medali emas, dua medali perak, dan dua medali perunggu.

FOTO : JENI WARDIN



LOGO ASIAN GAMES

Logo Asian Games yang melambangkan semangat berjuang dan berkompetisi, tergambar di lapangan utama *Athlete Village*, Jakabaring *Sport City*.



TENNIS CENTER JAKABARING

Arena ini menjadi saksi perolehan medali emas *Mixed Doubles* dari cabang tenis. Wakil Indonesia Aldila Sutjiadi/Christopher Rungkat mengalahkan pasangan Thailand Luksika Kumkhum/Sonchat Ratiwatana.

KANG EDU

CERITA & ILUSTRASI : BIMO ADI

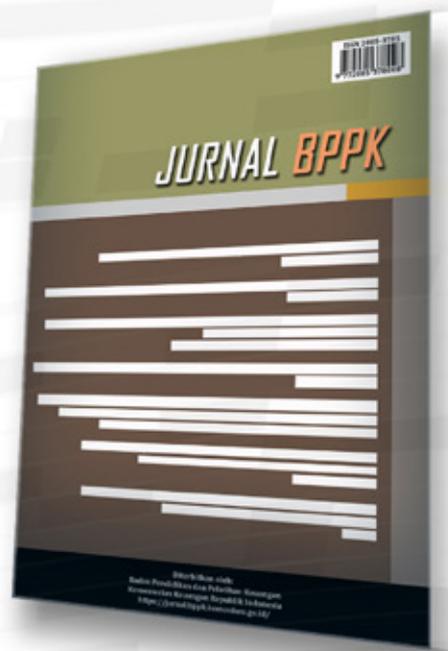


Telah Terbit!

JURNAL BPPK

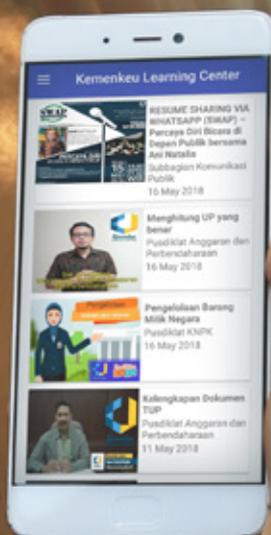
Volume 1 No.1 2018

ISSN 2085-3785



Anda dapat membacanya di:
<https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/jurnalbppk>

Belajar keuangan negara
Kapan saja &
Di mana saja



KLC klc.kemenkeu.go.id
KEMENKEU LEARNING CENTER

ISSN: 2086-4833



9 772086 483008